



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 /PMK.07/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012. *R*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, Keluarga Berencana (KB), kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan kawasan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

BAB II

ALOKASI

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:
 1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.005.931.000.000,00 (tiga triliun lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
 1. Pelayanan Dasar sebesar Rp1.155.990.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

2. Pelayanan Rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - i. Pelayanan Rujukan untuk Provinsi sebesar Rp117.420.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - ii. Pelayanan Rujukan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp631.836.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
3. Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.012.761.000.000,00 (empat triliun dua belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
 1. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Provinsi sebesar Rp601.914.150.000,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Bidang Infrastruktur Jalan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp3.410.846.850.000,00 (tiga triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.348.508.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan juta rupiah) terdiri atas:
 1. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Provinsi sebesar Rp404.552.400.000,00 (empat ratus empat miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. Bidang Infrastruktur Irigasi untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp943.955.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp502.494.000.000,00 (lima ratus dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp463.651.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp444.504.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat juta rupiah);
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.547.119.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta rupiah) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.359.619.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah).
- i. Bidang Pertanian sebesar Rp1.879.588.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp479.730.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- k. Bidang KB sebesar Rp392.257.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- l. Bidang Kehutanan sebesar Rp489.763.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp469.763.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- m. Bidang Sarana Perdagangan sebesar Rp345.132.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp356.940.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- o. Bidang Listrik Perdesaan sebesar Rp190.640.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- p. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.243.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp131.617.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp171.385.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan
- s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp121.385.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB III

PENETAPAN ALOKASI

Bagian Pertama

Kriteria

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis. ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;
 - b. Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan
 - c. Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- (5) Kriteria Teknis kegiatan DAK per bidang dirumuskan oleh menteri-menteri atau kepala badan/lembaga sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
- g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- h. Bidang KB dirumuskan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;
- j. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dirumuskan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
- k. Bidang Sarana Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan;
- l. Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;
- m. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahan Rakyat; dan
- n. Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan oleh Menteri Perhubungan.

Bagian Kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 4

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *sw*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup Kegiatan


Pasal 5

- (1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- a. Untuk SD/SD Luar Biasa dengan lingkup kegiatan:
 - 1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat;
 - 2. Pembangunan ruang kelas baru;
 - 3. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
 - 4. Pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan
 - b. Untuk SMP/SMP Luar Biasa dengan lingkup kegiatan:
 - 1. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat;
 - 2. Pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi kesenjangan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas yang ada dan memenuhi target angka partisipasi kasar di tahun 2015;
 - 3. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
 - 4. Pembangunan ruang belajar lainnya termasuk penyediaan alat pendidikan untuk laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan ruang keterampilan/serbaguna. *Am*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, serta dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit (RS) melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan RS provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu DAK Bidang Kesehatan dialokasikan juga untuk penyediaan obat dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- (3) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
- a. Kesehatan Pelayanan Dasar ditujukan untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, yang terdiri atas kegiatan:
 1. peningkatan puskesmas mampu menjalankan persalinan normal;
 2. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/puskesmas mampu Pelayanan Obstetri dan *Neonatal Emergency* Dasar, termasuk rumah dinas tenaga kesehatan (nakes) terutama di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
 3. pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas nakes; dan
 4. pembangunan Poskesdes.
 - b. Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
 1. pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas III RS;
 2. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif RS; 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 10 -

3. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS; dan
 4. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah.
- c. Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan:
1. pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
 2. pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten dan kota; dan
 3. pembangunan baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya.
- (4) DAK Bidang Infrastruktur Jalan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan.
- (5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota, serta pembangunan jalan dan jembatan provinsi, kabupaten/kota.
- (6) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target "Surplus Beras Minimal 10 Juta Ton dalam jangka waktu 5-10 tahun".
- (7) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala dan peningkatan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap pemenuhan target nasional tersebut. *AW*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (8) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dialokasikan untuk mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air minum.
- (9) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan, serta peningkatan pelayanan air minum di lokasi rawan air dan/atau terpencil.
- (10) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi.
- (11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;
 - b. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, *ecodrainage*, drainase skala kawasan.
- (12) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan daerah non pemekaran tertentu.
- (13) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan kantor Bupati, Walikota, Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 12 -

- (14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan).
- (15) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri atas:
- a. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap termasuk didalamnya pengadaan kapal untuk provinsi;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan
 - g. pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan.
- (16) DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk mendukung pengamanan dan peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.
- (17) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas:
- a. perluasan areal pertanian;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan;
 - d. penyediaan lumbung pangan masyarakat atau gudang pangan pemerintah; *AW*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten untuk Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan;
 - g. pembangunan/rehabilitasi Pusat/Pos/Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; dan
 - h. penanganan pasca panen.
- (18) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah, dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota terutama untuk meningkatkan kualitas air, udara dan tanah di wilayahnya melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang.
- (19) Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- a. pemantauan kualitas air yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung laboratorium, penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pembangunan laboratorium bergerak, dan kendaraan operasional;
 - b. pengendalian pencemaran melalui kegiatan penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah, Taman Kehati, Instalasi Pengolahan Air Limbah medik dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pengadaan kendaraan pengangkut sampah;
 - c. pengendalian polusi udara melalui kegiatan pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan
 - d. perlindungan sumber daya air melalui kegiatan penanaman di luar kawasan hutan, dan pengadaan papan informasi.
- (20) DAK Bidang KB dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui peningkatan:
- a. daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
 - b. sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;
 - c. sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi program KB; 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; dan
 - e. sarana pengolahan data dan informasi.
- (21) Lingkup kegiatan DAK Bidang KB sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:
- a. penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (*personal computer*) bagi Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB)/Petugas Penyuluh Lapangan KB (PPLKB);
 - b. pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implant Kit, IUD Kit) dan sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN) dan pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan *Public Adress* dan KIE.
- (22) DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air.
- (23) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas:
- a. rehabilitasi hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Kota;
 - b. sarana dan prasarana pengamanan hutan;
 - c. sarana dan prasarana Tahura;
 - d. sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
 - e. sarana dan prasarana penyuluhan
- (24) DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok), serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. *Am*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (25) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas:
- a. pendanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar tradisional;
 - b. peningkatan sarana metrologi legal; dan
 - c. pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang.
- (26) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dialokasikan untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju.
- (27) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri atas:
- a. penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan;
 - b. pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan;
 - c. penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro;
 - d. pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian; dan
 - e. pembangunan/rehabilitasi jembatan antardesa. ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (28) DAK Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru, rehabilitasi PLTMH yang rusak, perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), serta Pembangkit Listrik Tenaga *Hybrid*.
- (29) Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas kegiatan pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan.
- (30) DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota.
- (31) Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai SPM meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana air minum;
 - b. sarana septik tank komunal;
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu ;
 - d. jaringan distribusi listrik; dan
 - e. penerangan jalan umum
- (32) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi "*road map to zero accident*".



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (33) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (32) terdiri atas kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan melalui pemasangan rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, alat pengatur isyarat lalu lintas, paku jalan, dan *delienator*.
- (34) DAK Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk:
- a. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); dan
 - c. mendukung keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan.
- (35) Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) terdiri atas:
- a. jalan poros desa melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh; dan
 - b. penyediaan angkutan perdesaan melalui pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (36) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, yaitu mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan. *su*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (37) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) terdiri atas:
- a. Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya, yang disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan DAK jalan, Dana Dekonsentrasi/TugasPembantuan Kementerian Pekerjaan Umum, serta APBD;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan, yang disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD; dan
 - c. penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa, yang disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan dan APBD.

BAB IV

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, menteri/kepala badan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK untuk masing-masing bidang.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang menjadi dasar pelaksanaan DAK di daerah merupakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/kepala Badan.
- (3) Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sesudah Peraturan Menteri ini diundangkan. *Am*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB V

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh menteri/kepala badan terkait.
- (3) DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 9

- (1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang diterimanya.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

BAB VI

DANA PENDAMPING

Pasal 10

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping paling kurang 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK masing-masing bidang.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan fisik. ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK masing-masing bidang kepada menteri teknis/kepala badan terkait.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang merupakan kompilasi dari laporan seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Menteri/kepala badan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri/kepala badan melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing. ✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan DAK.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan DAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

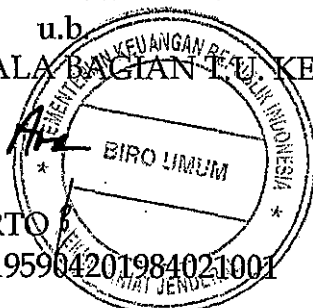
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya

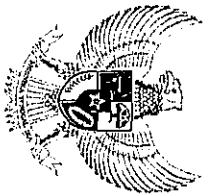
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN I, KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 /PMK.07/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012
UNTUK MASING-MASING PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	DAERAH	KESEHATAN										TOTAL							
		PEND	DITKAN	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRICASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH								
1	Provinsi Aceh	8.896.32	2.320.71	3.074.37	1.046.36	8.719.04	18.061.29	17.022.14	952.13	1.265.89	5.914.76	4.021.45	926.99	878.91	1.195.74	1.644.25	1.248.07	215.95	50.415.71
2	Kab. Aceh Barat	12.894.24	3.186.01	2.682.78	1.954.34	11.947.72	6.314.57	2.728.97	3.623.15	1.175.40	1.248.00	2.765.92	4.778.82	836.64	1.551.18	1.289.73	1.226.59	223.30	38.659.88
3	Kab. Aceh Selatan	9.068.15	4.455.21	2.851.33	1.649.61	3.223.51	6.100.18	2.850.69	1.086.59	812.31	3.341.37	2.246.32	3.600.81	1.120.08	868.31	1.354.14	1.485.13	1.122.89	48.599.16
4	Kab. Aceh Singkil	6.922.20	2.257.13	2.251.12	1.373.57	6.517.87	8.687.46	2.075.18	827.02	807.44	3.900.92	3.623.96	1.782.48	894.64	1.109.08	1.485.13	1.222.89	255.77	37.510.77
5	Kab. Aceh Tenggara	7.117.42	2.311.12	4.271.95	1.217.91	9.511.63	9.511.63	2.304.75	3.048.77	1.971.05	4.312.85	2.982.60	1.056.54	1.071.80	1.259.74	4.208.96	1.019.04	944.58	46.747.21
6	Kab. Aceh Tenggara	9.511.63	2.304.75	3.048.77	1.971.05	23.322.22	3.507.28	1.777.47	2.545.19	9.271.40	9.271.40	1.147.50	1.111.00	1.111.00	1.714.18	3.900.55	5.972.77	1.079.32	35.997.42
7	Kab. Aceh Utara	23.322.22	3.507.28	1.777.47	2.545.19	9.488.82	3.877.61	1.514.77	4.720.95	6.518.82	1.156.06	1.247.30	1.247.30	1.247.30	1.247.30	1.247.30	1.247.30	211.87	28.543.24
8	Kab. Aceh Utara	13.025.35	3.759.93	2.716.06	3.015.43	13.025.35	3.759.93	2.716.06	3.015.43	13.025.35	3.759.93	2.716.06	3.015.43	13.025.35	3.759.93	2.716.06	3.015.43	13.025.35	51.021.39
9	Kab. Aceh Utara	10.175.93	2.637.20	2.532.40	2.256.68	10.175.93	2.637.20	2.532.40	2.256.68	10.175.93	2.637.20	2.532.40	2.256.68	10.175.93	2.637.20	2.532.40	2.256.68	10.175.93	51.134.13
10	Kab. Aceh Utara	10.590.92	2.689.95	1.923.91	1.300.48	6.595.57	1.882.46	1.254.71	2.703.65	6.265.30	3.184.85	903.77	884.90	1.231.48	884.90	4.953.01	4.009.38	973.07	42.234.93
11	Kab. Aceh Utara	4.461.74	1.468.42	2.054.17	716.86	4.461.74	1.468.42	2.054.17	716.86	4.461.74	1.468.42	2.054.17	716.86	4.461.74	1.468.42	2.054.17	716.86	4.461.74	26.993.57
12	Kota Banda Aceh	5.748.01	2.004.76	1.824.11	1.404.19	5.748.01	2.004.76	1.824.11	1.404.19	5.748.01	2.004.76	1.824.11	1.404.19	5.748.01	2.004.76	1.824.11	1.404.19	5.748.01	27.478.10
13	Kota Banda Aceh	4.305.64	1.924.73	2.029.83	977.74	4.305.64	1.924.73	2.029.83	977.74	4.305.64	1.924.73	2.029.83	977.74	4.305.64	1.924.73	2.029.83	977.74	4.305.64	26.917.67
14	Kota Banda Aceh	6.312.86	2.139.29	1.745.57	1.380.91	6.312.86	2.139.29	1.745.57	1.380.91	6.312.86	2.139.29	1.745.57	1.380.91	6.312.86	2.139.29	1.745.57	1.380.91	6.312.86	27.478.10
15	Kota Banda Aceh	9.587.58	2.623.60	1.806.57	862.72	9.587.58	2.623.60	1.806.57	862.72	9.587.58	2.623.60	1.806.57	862.72	9.587.58	2.623.60	1.806.57	862.72	9.587.58	46.517.31
16	Kab. Aceh Barat Daya	9.133.41	2.058.10	3.382.99	1.172.86	9.133.41	2.058.10	3.382.99	1.172.86	9.133.41	2.058.10	3.382.99	1.172.86	9.133.41	2.058.10	3.382.99	1.172.86	9.133.41	44.339.27
17	Kab. Aceh Barat Daya	15.859.34	1.650.95	3.435.26	1.095.99	15.859.34	1.650.95	3.435.26	1.095.99	15.859.34	1.650.95	3.435.26	1.095.99	15.859.34	1.650.95	3.435.26	1.095.99	15.859.34	42.395.07
18	Kab. Aceh Barat Daya	7.015.70	5.947.76	1.715.96	1.492.99	7.015.70	5.947.76	1.715.96	1.492.99	7.015.70	5.947.76	1.715.96	1.492.99	7.015.70	5.947.76	1.715.96	1.492.99	7.015.70	33.009.85
19	Kab. Aceh Barat Daya	5.594.04	3.162.87	2.541.81	1.097.52	5.594.04	3.162.87	2.541.81	1.097.52	5.594.04	3.162.87	2.541.81	1.097.52	5.594.04	3.162.87	2.541.81	1.097.52	5.594.04	35.525.31
20	Kab. Aceh Barat Daya	6.388.74	2.076.07	2.826.84	1.501.42	6.388.74	2.076.07	2.826.84	1.501.42	6.388.74	2.076.07	2.826.84	1.501.42	6.388.74	2.076.07	2.826.84	1.501.42	6.388.74	186.32
21	Kota Subulussalam	5.828.69	1.062.05	1.709.69	1.240.67	5.828.69	1.062.05	1.709.69	1.240.67	5.828.69	1.062.05	1.709.69	1.240.67	5.828.69	1.062.05	1.709.69	1.240.67	5.828.69	41.828.39
22	Kota Subulussalam	31.651.63	4.566.54	1.686.47	2.896.20	31.651.63	4.566.54	1.686.47	2.896.20	31.651.63	4.566.54	1.686.47	2.896.20	31.651.63	4.566.54	1.686.47	2.896.20	31.651.63	41.828.39
23	Kota Subulussalam	9.442.47	2.997.70	1.687.16	1.528.23	9.442.47	2.997.70	1.687.16	1.528.23	9.442.47	2.997.70	1.687.16	1.528.23	9.442.47	2.997.70	1.687.16	1.528.23	9.442.47	65.206.66
24	Kota Subulussalam	19.297.76	8.887.38	8.887.38	8.887.38	19.297.76	8.887.38	8.887.38	8.887.38	19.297.76	8.887.38	8.887.38	8.887.38	19.297.76	8.887.38	8.887.38	8.887.38	19.297.76	43.587.20
25	Kab. Aceh Besar	9.204.96	3.199.90	1.664.94	1.103.24	9.204.96	3.199.90	1.664.94	1.103.24	9.204.96	3.199.90	1.664.94	1.103.24	9.204.96	3.199.90	1.664.94	1.103.24	9.204.96	65.476.16
26	Kab. Aceh Besar	52.513.35	3.094.85	1.716.53	1.378.40	52.513.35	3.094.85	1.716.53	1.378.40	52.513.35	3.094.85	1.716.53	1.378.40	52.513.35	3.094.85	1.716.53	1.378.40	52.513.35	38.825.59
27	Kab. Aceh Besar	16.280.50	6.518.21	3.519.76	2.553.91	16.280.50	6.518.21	3.519.76	2.553.91	16.280.50	6.518.21	3.519.76	2.553.91	16.280.50	6.518.21	3.519.76	2.553.91	16.280.50	73.996.69
28	Kab. Aceh Besar	12.953.63	3.621.99	1.773.40	2.253.03	12.953.63	3.621.99	1.773.40	2.253.03	12.953.63	3.621.99	1.773.40	2.253.03	12.953.63	3.621.99	1.773.40	2.253.03	12.953.63	41.556.73
29	Kab. Aceh Besar	18.813.49	4.287.74	1.889.40	2.232.76	18.813.49	4.287.74	1.889.40	2.232.76	18.813.49	4.287.74	1.889.40	2.232.76	18.813.49	4.287.74	1.889.40	2.232.76	18.813.49	55.838.07
30	Kab. Aceh Besar	5.842.76	6.531.46	3.270.73	3.289.50	5.842.76	6.531.46	3.270.73	3.289.50	5.842.76	6.531.46	3.270.73	3.289.50	5.842.76	6.531.46	3.270.73	3.289.50	5.842.76	98.137.26
31	Kab. Aceh Besar	15.890.08	2.342.89	1.733.50	1.271.04	15.890.08	2.342.89	1.733.50	1.271.04	15.890.08	2.342.89	1.733.50	1.271.04	15.890.08	2.342.89	1.733.50	1.271.04	15.890.08	40.858.63
32	Kab. Aceh Besar	14.278.32	5.392.63	2.284.31	1.529.85	14.278.32	5.392.63	2.284.31	1.529.85	14.278.32	5.392.63	2.284.31	1.529.85	14.278.32	5.392.63	2.284.31	1.529.85	14.278.32	53.566.97
33	Kab. Aceh Besar	14.255.96	4.125.77	1.721.93	1.529.85	14.255.96	4.125.77	1.721.93	1.529.85	14.255.96	4.125.77	1.721.93	1.529.85	14.255.96	4.125.77	1.721.93	1.529.85	14.255.96	48.644.24
34	Kab. Aceh Besar	18.848.78	3.052.77	1.713.08	1.410.93	18.848.78	3.052.77	1.713.08	1.410.93	18.848.78	3.052.77	1.713.08	1.410.93	18.848.78	3.052.77	1.713.08	1.410.93	18.848.78	50.220.62
35	Kab. Aceh Besar	6.531.32	2.282.06	2.374.74	1.645.70	6.531.32	2.282.06	2.374.74	1.645.70	6.531.32	2.282.06	2.374.74	1.645.70	6.531.32	2.282.06	2.374.74	1.645.70	6.531.32	52.173.97
36	Kota Medan	25.597.65	10.801.83	2.099.88	8.164.18	25.597.65	10.801.83	2.099.88	8.164.18	25.597.65	10.801.83	2.099.88	8.164.18	25.597.65	10.801.83	2.099.88	8.164.18	25.597.65	58.76
37	Kota Medan	10.372.15	2.587.56	2.587.56	2.587.56	10.372.15	2.587.56	2.587.56	2.587.56	10.372.15	2.587.56	2.587.56	2.587.56	10.372.15	2.587.56	2.587.56	2.587.56	10.372.15	22.919.27
38	Kota Medan	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	66.298.27
39	Kota Medan	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	1.969.88	1.759.82	594.88	6.138.00	33.18
40	Kota Medan	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	28.447.08
41	Kota Medan	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	1.482.70	2.012.76	615.37	3.213.88	17.955.74

(dalam juta rupiah)

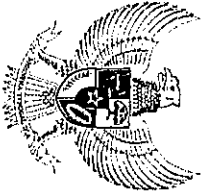


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN			INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN																		
42	Kota Tebing Tinggi	3.685,83	1.354,87	1.795,73	873,92	2.694,16	4.723,12	1.690,24	710,02	1.221,42		1.077,76	2.467,43	1.746,04	693,30				589,64					25.323,48
43	Kota Padangsidempuan	5.414,31	1.909,84	1.728,08	1.242,41	3.138,64	4.993,38	874,78	707,48	784,89		1.311,19		773,66	744,79				363,15					23.986,60
44	Kab. Pakpak Bharat	4.299,25	1.764,26	1.880,03	717,66	2.053,87	4.144,43	1.167,82	600,94	688,87			960,78	824,38	662,69		1.338,47	937,18	204,02					25.460,90
45	Kab. Nias Selatan	32.760,84	4.825,02	1.873,77	2.170,98	2.350,85	6.039,49	1.687,50	809,16	706,45		1.552,21	3.545,91	1.104,16	1.001,84		1.958,60	1.149,39	252,46	890,54				64.679,17
46	Kab. Humbang Hasundutan	7.823,39	2.074,67	1.690,17	869,21	2.040,99	5.425,49	937,27	746,32	765,21		953,78	3.146,95	674,86	686,54			921,09	212,20					28.968,14
47	Kab. Serdang Bedagai	28.507,37	4.619,20	1.999,51	1.830,26	2.580,50	10.481,77	1.132,20	992,58	918,81		3.518,86	4.791,63	1.201,94	903,72			954,97	271,58					64.704,90
48	Kab. Sumsel	11.527,40	1.904,91	1.763,38	960,74		5.913,20	1.170,09	647,26	760,43		4.948,40	3.919,08	887,64	712,51	1.025,76		778,36	206,97					37.126,13
49	Kab. Batu bara	25.197,23	1.558,30	1.667,87	2.648,66		3.738,51	785,92	727,90	720,55		1.496,40	3.678,49	950,70	714,37				263,74					44.148,64
50	Kab. Padang Lawas	9.972,04	3.148,28	2.504,02	2.297,09	2.517,02	5.256,39	826,55	714,07	570,47	3.574,70	1.253,47	3.288,53	738,99	755,44	1.129,27			191,99			3.782,53		42.520,85
51	Kab. Padang Lawas Utara	18.906,41	1.315,49	1.657,56	1.058,20	1.968,11	5.860,74	890,05	725,60	708,03		909,82		712,88	815,34	1.015,33								189,68
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	15.705,38	1.714,16	2.412,97	1.867,31		5.557,07	664,94	612,13	522,12		833,57	2.785,07	720,63	630,54				192,11			3.898,22		34.218,00
53	Kab. Labuhanbatu Utara	11.389,56	1.949,03	5.291,87	2.060,37		5.376,40	723,77	795,60	638,86	4.034,30	877,79	3.694,72	870,54	589,93				204,18					42.495,14
54	Kab. Nias Utara	13.978,38	2.225,29	1.907,62	1.546,54		6.085,11	1.327,28	795,66	657,35		1.341,88		1.594,84	768,97		1.688,42	1.137,81	251,60	1.098,40				36.405,15
55	Kab. Nias Barat	28.352,12	5.872,30	2.116,40	3.121,05		6.584,32	1.930,70	929,19	775,44		2.340,79	3.773,63	1.017,41	845,13	1.396,04	1.733,12	1.196,48	322,59	1.447,87				63.754,58
56	Kota Gunungstoli	22.958,53	4.686,61	3.639,72	3.216,15		11.207,34	2.586,27	1.117,82	1.081,49		2.513,32		1.214,79	952,87	1.406,26			317,01					56.898,18
III	Provinsi Sumatera Barat					3.604,72	13.336,58	11.017,61				4.541,81												32.500,72
57	Kab. Lima puluh Kota	11.851,23	3.501,14	1.708,88	1.107,42	2.392,13	6.861,53	2.926,21	784,74	753,05	1.573,77	3.666,14	4.325,44	796,84	748,74	1.206,87			211,17					44.415,30
58	Kab. Agam	35.543,20	3.794,45	1.769,15	1.405,77	2.678,80	8.625,69	4.208,96	1.094,68	1.195,37		4.802,21	5.439,43	983,52	1.022,23	1.354,32			284,97					74.202,75
59	Kab. Kepulauan Mentawai	7.765,63	1.967,43	1.846,56	1.179,09		10.057,73	1.272,50	717,78	708,54		4.921,30		1.011,52	718,41		2.348,65		212,14	857,12				35.584,40
60	Kab. Padang Pariaman	24.861,31	3.610,58	1.774,25	2.181,90		7.922,71	3.957,85	1.862,61	738,11	1.720,75	4.859,12	4.817,84	912,79	842,53	1.205,86	1.133,02	1.218,73	297,24					63.917,20
61	Kab. Pasaman	14.719,99	2.746,37	2.223,20	1.755,77	2.092,43	5.735,54	2.072,99	1.018,55	997,79		3.435,00	4.173,29	753,52	766,02	1.250,65			197,92					43.939,03
62	Kab. Pesisir Selatan	17.962,16	3.602,37	4.625,40	2.441,75	2.747,20	15.075,94	3.981,55	1.103,28	1.198,62		4.607,34	6.212,77	885,22	917,80	1.061,23	1.808,68	1.982,07	229,95					70.443,33
63	Kab. Sijunjung	9.874,56	3.960,24	1.716,69	1.236,09		7.812,67	4.165,37	772,20	999,79		2.600,29	4.519,52	855,87	730,84	1.219,49	1.260,24	1.057,96	210,33					42.992,15
64	Kab. Solok	13.897,32	3.701,62	1.736,19	1.484,79		9.728,04	2.100,36	1.025,37	821,41	3.438,15	2.369,79	4.455,67	1.445,09	818,36	1.183,64	1.495,76	985,11	216,82			3.859,08		54.762,57
65	Kab. Tanah Datar	10.901,27	4.162,23	2.503,05	985,42	2.489,28	9.547,00	5.422,54	908,02	1.077,38		1.969,20	4.823,31	739,37	904,42	1.256,66			290,88					47.980,03
66	Kota Bukittinggi	4.265,74	1.655,45	2.265,42	551,17		2.898,70	713,10	694,99	1.229,15		1.290,68	2.624,52	1.067,84	673,39				647,12					20.577,27
67	Kota Padang Panjang	3.362,15	1.060,38	1.700,94	600,87		2.830,95	1.038,33	773,86	860,27		1.212,60	2.589,68	841,44	629,62			741,47	387,05					18.629,61
68	Kota Padang	24.233,83	4.515,32	2.675,25	3.161,23	2.239,74	7.560,50	1.516,63	780,42	1.205,93	3.209,43	2.712,98	3.099,55	1.264,97	875,38				274,91		4.796,69			64.122,76
69	Kota Payakumbuh	6.981,58	1.630,48	1.983,85	779,64		2.771,73	688,61	687,17	1.034,53	3.338,43	1.154,40	2.746,79	731,51	706,66				324,53					25.559,91
70	Kota Sawahlunto	3.794,15	1.356,44	1.757,89	742,47		4.393,88	717,27	835,50	1.002,27		1.047,97	2.703,24	1.020,69	621,11				244,03					20.236,91
71	Kota Solok	3.380,86	1.185,92	2.021,46	483,80		4.609,15	1.901,56	714,86	1.153,98	3.075,44	1.083,08	2.582,63	791,78	625,23				298,91					23.908,66
72	Kota Pariaman	7.510,20	1.241,36	1.733,65	535,37		3.411,96	1.001,98	662,12	1.112,16	2.274,81	2.583,54	2.723,13	1.226,62	657,82				347,72					27.022,44
73	Kab. Pasaman Barat	16.440,71	3.426,56	1.760,92	1.646,15	2.976,18	7.788,08	2.372,71	893,75	837,54		4.398,99	4.794,93	847,38	691,77	1.221,05	1.498,53	1.094,03	219,02					52.908,30
74	Kab. Dharmasraya	6.376,25	2.341,18	1.767,36	1.121,70	2.066,14	6.178,89	1.370,71	967,68	834,23	2.950,44	2.044,41	3.573,29	935,84	675,01	1.131,19	1.092,76	919,19	209,19					36.555,46
75	Kab. Solok Selatan	6.402,02	1.895,58	2.046,86	962,15	2.523,59	4.005,94	2.275,29	784,52	648,11	3.106,52	1.262,11	3.016,20	909,32	677,05	1.151,02	1.160,90	1.014,60	189,13					34.030,91
IV	Provinsi Riau						32.512,11	21.201,61				7.439,04												62.491,37
76	Kab. Bengkalis	25.704,69					10.337,65					3.479,11		1.352,81					40.874,26					
77	Kab. Indragiri Hilir	40.558,90				3.490,30	12.691,47	3.438,42	1.290,33			3.488,05	7.048,39	1.364,48					73.370,34					
78	Kab. Indragiri Hulu	27.100,05					12.902,42	3.532,21		1.450,58						1.476,15			46.461,41					
79	Kab. Kampar						12.291,48	3.407,88				3.641,49	5.987,26	1.298,73	1.154,68				29.224,29					
80	Kab. Kuantan Singingi			3.125,55			17.972,40	4.860,34								1.454,45			27.412,74					
81	Kab. Pelalawan						9.113,69	4.129,95				3.376,89	8.849,80	1.306,91					26.777,24					
82	Kab. Rokan Hilir			5.743,59			13.754,05					3.595,15	5.955,60	1.402,84					30.451,23					
83	Kab. Rokan Hulu						10.157,29						5.754,75	1.279,97					17.192,01					
84	Kab. Siak					4.042,11	11.671,52												15.713,63					
85	Kota Dumai																							



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	DAERAH	KESEHATAN										SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH								
170	Kota Bogor	3.954,75	2.157,18	2.961,96	3.647,73		1.955,99	2.177,81	1.186,19	3.959,29	2.373,78	878,91	989,90		676,17				15.235,05
171	Kota Cirebon	2.816,65	6.530,97	5.878,28	7.678,15	2.704,32	2.229,73	1.343,42	677,13	1.121,92	838,46	741,47	713,78	1.200,00	664,10				20.172,18
172	Kota Depok	2.914,52	2.153,33	1.652,12	1.200,52	2.562,93	4.515,47	599,18	707,89	1.060,80	877,94	658,04	635,58	1.200,00	655,35				32.061,51
173	Kota Sukabungur	7.904,90	1.880,02	2.792,77	1.878,98	3.302,01	3.042,44	623,05	2.973,46	1.155,60	3.055,00	616,40	773,78	1.200,00	571,92				18.138,66
174	Kota Cimahi	7.456,92	2.493,20	2.156,30	2.973,46	3.302,01	3.042,44	623,05	2.973,46	1.155,60	3.055,00	616,40	773,78	1.200,00	831,57				26.916,07
175	Kota Tasikmalaya	4.477,76	1.284,98	1.787,12	1.006,34	2.973,46	2.973,46	689,92	980,48	1.006,34	557,01	557,01	654,38	1.186,38	468,24				30.936,59
176	Kota Banjar	54.981,81	6.235,92	5.959,35	21.465,62	2.445,12	5.353,96	4.066,70	962,45	790,72	4.449,80	5.266,58	6.723,19	1.292,36	304,89				72.164,99
177	Kab. Bandung Barat	13.411,06	13.617,41	2.783,14	2.966,59	2.845,12	5.353,96	4.066,70	962,45	790,72	4.449,80	5.266,58	6.723,19	1.292,36	338,44				29.687,20
XIII	Provinsi Banten	40.444,50	13.180,60	2.785,76	5.156,79	2.150,94	5.630,70	4.086,21	976,59	1.016,68	3.077,09	5.266,58	6.723,19	1.292,36	242,62				66.461,25
178	Kab. Lebak	29.283,66	10.885,80	3.258,93	6.978,54	3.204,91	6.978,54	3.184,48	1.886,64	1.091,05	4.461,12	5.720,28	990,42	1.286,65	301,05				104.882,67
179	Kab. Pandeglang	40.756,95	15.905,26	12.793,69	3.204,91					4.677,91					301,05				64.713,25
180	Kab. Serang	25.994,10	1.441,28	1.975,31	4.176,85	4.408,50	820,71	638,71	990,51	1.590,19	2.382,84	895,60	662,94	1.032,67	328,82				84.826,25
181	Kab. Tangerang	34.698,90		8.184,59	6.785,81	20.938,74	13.523,06	1.182,74	1.056,37	2.564,28	1.207,94	5.360,39	886,27	952,88	769,25				49.457,83
182	Kota Tangerang	21.813,22	9.602,91	3.013,38	2.691,31	2.525,41	7.963,80	4.960,24	1.182,74	2.564,28	1.207,94	5.360,39	886,27	952,88	46.693,01				46.693,01
XIV	Provinsi Jawa Tengah	66.098,74	7.824,65	5.399,77	4.428,74	3.895,62	4.828,24	4.809,19	2.406,62	1.493,51	4.735,17	1.132,37	1.149,37	1.247,37	335,07				67.730,85
186	Kab. Banjarnegara	13.455,95	4.157,47	1.702,60	2.841,81	3.098,64	6.474,40	5.951,99	1.872,79	1.060,20	4.714,23	4.619,77	955,43	1.295,54	397,13				118.901,78
187	Kab. Banyuwangi	17.562,98	4.648,51	5.281,95	3.240,19	3.001,88	8.328,22	2.776,55	1.290,77	1.177,11	1.556,18	1.030,55	1.032,22	1.238,19	337,97				54.673,90
188	Kab. Blora	14.029,88	5.642,13	3.866,79	3.916,94	11.692,31	5.319,43	1.880,53	1.395,95	1.579,22	4.626,47	1.070,94	914,47	1.443,95	270,25				53.989,76
189	Kab. Boyolali	30.887,88	10.618,26	2.962,58	3.574,94	7.752,22	3.219,43	1.862,29	1.666,27	5.390,42	5.976,36	1.117,64	1.032,87	1.308,41	326,48				60.360,69
190	Kab. Brebes	31.205,36	7.512,97	9.016,12	6.835,17	9.046,18	5.279,46	1.970,72	1.565,17	5.157,26	6.317,06	1.189,11	1.035,50	1.295,15	306,93				84.451,16
191	Kab. Cilacap	41.123,80	4.259,14	2.203,67	4.912,68	7.934,82	854,47	1.333,97	1.434,63	3.879,60	5.097,06	811,09	899,84	1.250,34	357,20				87.652,46
192	Kab. Demak	48.268,78	11.424,96	2.508,99	5.583,48	3.047,69	7.351,85	4.591,92	1.809,25	1.332,51	1.526,70	5.870,84	1.095,19	1.328,48	288,98				81.553,31
193	Kab. Grobogan	32.906,82	5.223,57	6.393,89	2.930,14	3.731,27	8.311,76	5.401,17	1.318,98	1.341,72	2.739,79	4.217,48	1.192,30	1.302,93	97,035,02				97.035,02
194	Kab. Jepara	3.203,52	1.566,01	2.187,50	2.187,50	7.617,74	3.591,05	1.318,98	1.341,72	2.739,79	4.217,48	1.192,30	1.302,93	76.460,53	3.973,46				76.460,53
195	Kab. Karanganyar	5.885,63	2.571,70	4.960,60	7.431,46	1.672,82	2.627,16	1.571,37	1.481,49	3.878,60	5.725,22	900,49	1.013,51	1.159,76	373,56				55.514,41
196	Kab. Klaten	1.681,91	3.923,41	3.923,41	7.137,14	2.627,80	1.245,99	1.048,49	3.328,36	3.878,60	5.725,22	900,49	1.013,51	1.159,76	342,72				3.881,40
197	Kab. Kudus	29.627,60	5.766,16	1.681,91	3.923,41	7.137,14	2.627,80	1.245,99	1.048,49	3.328,36	3.878,60	5.725,22	900,49	1.013,51	342,72				100.103,33
198	Kab. Kebumaha	30.813,85	6.590,28	1.744,71	4.117,15	7.162,74	3.971,83	1.838,95	1.893,64	2.341,87	5.283,33	1.105,60	1.153,50	1.215,89	394,88				63.884,98
199	Kab. Klaten	29.134,84	2.815,91	1.657,67	2.977,95	2.582,54	8.514,75	6.163,54	1.327,23	1.107,14	1.917,03	714,82	1.280,85	352,90	490,59				74.501,53
200	Kab. Karanganyar	32.906,82	5.223,57	6.393,89	2.930,14	3.731,27	8.311,76	5.401,17	1.318,98	1.341,72	2.739,79	4.217,48	1.192,30	1.302,93	522,97				103.595,18
201	Kab. Kebumaha	33.563,35	4.897,32	4.219,55	3.924,52	2.605,94	6.822,87	2.313,30	2.795,64	1.149,20	4.453,16	798,14	901,05	1.162,02	406,92				75.989,64
202	Kab. Karanganyar	40.253,91	5.532,09	9.528,42	4.326,09	7.109,39	4.716,38	1.705,49	1.376,09	3.714,06	7.698,38	1.062,30	916,60	1.346,35	372,66				92.869,03
203	Kab. Paksi	37.023,84	4.785,17	2.693,47	3.827,54	2.981,74	8.073,21	4.577,21	1.831,07	1.012,66	3.649,81	4.039,77	807,70	911,58	329,32				77.029,38
204	Kab. Karanganyar	35.123,53	5.783,28	3.765,00	4.064,87	3.081,46	8.456,79	2.668,71	1.820,09	1.002,52	4.947,02	6.053,01	1.117,43	1.125,72	321,55				80.449,02
205	Kab. Karanganyar	57.895,12	12.653,17	2.872,42	8.514,75	6.163,54	1.327,23	1.107,14	1.917,03	714,82	1.280,85	352,90	406,92	1.324,08	323,29				78.350,60
206	Kab. Purworejo	33.387,14	4.969,91	2.244,52	2.859,62	2.605,94	6.822,87	2.313,30	2.795,64	1.149,20	4.453,16	798,14	901,05	1.162,02	353,70				69.378,28
207	Kab. Semarang	25.013,18	4.099,75	1.957,79	3.923,16	2.693,38	6.805,52	2.199,35	1.372,38	3.506,28	1.835,58	4.982,87	1.104,78	1.250,49	353,70				78.350,60
208	Kab. Semarang	28.350,43	4.823,84	2.412,54	2.597,03	2.535,10	8.092,81	3.895,46	1.821,59	895,64	4.580,54	4.834,37	1.048,52	920,96	324,37				69.378,28
209	Kab. Subaburjo	16.370,01	4.384,74	1.667,01	2.423,70	2.657,83	6.330,30	2.591,27	1.355,71	1.355,12	2.881,69	4.457,37	1.333,83	1.176,41	464,91				47.616,31
210	Kab. Tegal	25.965,97	5.423,86	10.226,35	4.986,56	2.122,88	7.884,60	3.885,62	1.333,35	2.654,11	2.881,69	4.457,37	1.333,83	1.176,41	440,93				74.555,35
211	Kab. Temanggung	45.381,21	4.143,55	3.106,62	3.057,18	15.066,80	3.896,15	711,01	769,28	1.350,05	1.828,01	4.226,62	1.092,84	960,68	339,91				87.203,72
212	Kab. Wonorejo	28.233,03	8.747,66	1.750,15	3.160,86	2.713,26	9.451,44	4.818,68	1.600,07	1.410,06	2.440,59	1.676,16	4.063,83	711,57	291,10				75.052,10

(dalam juta rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN					INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARCA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIASASI																
214	Kab. Wonorejo	18.444,65	4.963,51	2.495,13	2.115,67	2.101,61	6.612,81	3.746,08	2.153,37	838,88	2.410,31	1.898,21	4.768,67	1.016,69	914,21	1.155,45		335,02					55.970,27	
215	Kota Magelang	3.177,95	1.272,54	1.639,46	462,54	2.255,21	4.551,70		1.462,93	861,00	1.764,87	925,58		930,13	648,00								20.667,81	
216	Kota Pekalongan	6.094,94	1.694,41	1.845,26	781,09		5.282,40		831,28	1.710,13	1.515,08	1.914,81		866,18	681,79					3.335,05			27.126,72	
217	Kota Salatiga	4.254,13	1.704,45	1.677,89	571,23	2.572,98	6.538,60	1.336,31	854,64	1.013,33		1.067,02	2.784,64	744,78	626,19	1.210,21							27.639,76	
218	Kota Semarang	35.276,64	14.879,09		5.927,93		7.535,33		3.392,26	1.461,14				1.095,58	1.002,34	1.284,29							72.270,90	
219	Kota Surakarta	10.475,73	3.346,81	1.921,01	2.355,56		4.787,30		879,76	1.249,02		1.311,59		1.059,86	777,16								28.972,18	
220	Kota Tegal	4.857,84	2.590,97	5.505,33	1.093,06	2.747,94	3.482,83		718,60	1.945,16		3.510,95		744,23	702,36								30.554,77	
XV	Provinsi DI Yogyakarta					3.020,82	8.828,82	4.120,89			2.220,38				861,83								19.052,74	
221	Kab. Bantul	26.649,13	3.945,70	1.913,38	3.671,28	2.753,02	6.424,05	1.774,41	1.569,68	1.307,93	2.221,49	2.718,51	3.693,90	1.139,54	862,09	1.136,53		980,55					63.281,45	
222	Kab. Gunung Kidul	24.528,91	6.463,80	1.719,49	1.650,13	3.523,70	7.305,38	3.147,40	3.049,74	1.255,22	2.780,58	5.129,96	5.733,55	923,45	893,74	1.184,53		1.014,77					70.584,42	
223	Kab. Kulon Progo	10.477,13	4.585,88	1.724,09	1.597,17	2.579,15	4.931,88	1.190,48	1.580,05	897,80	1.802,46	5.736,99	3.916,81	919,48	840,65	1.151,49		1.075,32					45.379,52	
224	Kab. Sleman	15.344,92	5.325,32	3.988,49	892,88	3.351,65	5.471,18	3.866,29	1.944,55	1.501,41		2.539,84	4.039,06	951,47	1.267,73	1.276,70							52.237,39	
225	Kota Yogyakarta								2.487,50	1.150,28				1.172,64	911,88								6.485,35	
XVI	Provinsi Jawa Timur					10.136,85	15.542,02	19.511,40				6.390,16			1.207,25								52.787,68	
226	Kab. Bangkalan	28.221,36	9.452,02	2.412,54	3.302,46	2.577,97	6.887,40	2.241,50	1.405,51	994,34		3.142,63	4.446,07	1.126,75	1.102,29	1.247,35	1.262,30	1.178,26					71.355,49	
227	Kab. Banyuwangi	24.968,54	7.309,04		5.894,99	3.426,00	7.348,14	3.005,02	1.610,30	1.099,11		5.289,95	6.467,85		1.237,25								67.656,19	
228	Kab. Blitar	27.642,27	4.920,13	2.298,09	4.541,20	2.062,99	6.509,33	3.012,48	1.880,03	1.315,60	2.265,43	2.235,45	5.881,09	897,61	1.081,88	1.198,23							68.085,94	
229	Kab. Bojonegoro	39.913,35	4.883,47		4.790,09				1.309,25			3.170,95	5.607,86	1.121,75	1.206,88	1.290,98		5.050,59					68.347,17	
230	Kab. Bondowoso	26.326,67	3.824,52	2.676,22	3.207,33	2.075,94	7.492,95	4.477,12	1.111,62	900,82	1.888,44	1.186,25	4.686,67	988,01	999,52	1.139,44	999,59	1.138,18					65.417,78	
231	Kab. Gresik	49.630,77		2.591,15	5.494,10	3.496,91	7.428,26	4.856,38	1.526,56	1.439,92		4.579,24			1.132,47								82.505,06	
232	Kab. Jember	45.993,81	8.777,79	5.122,73	9.186,44		7.581,25	2.987,68	1.793,03	1.255,70			6.088,26		1.121,63			5.146,88					95.364,74	
233	Kab. Jombang	60.099,27	4.447,93	1.647,23	5.856,45	2.546,11	5.252,24	1.962,73	1.123,19	1.213,11	1.253,52	1.163,68	4.357,67	882,96	1.104,25	1.239,61							94.467,88	
234	Kab. Kediri	63.772,12	4.900,08	1.834,48	6.335,13		4.594,42	2.697,27	1.356,42	1.106,20	1.491,37	1.273,99	4.863,55	933,46	1.154,13	1.108,60		4.295,56					102.056,87	
235	Kab. Lamongan	29.785,94	5.542,87	2.014,78	4.535,76	2.912,92	6.572,19	2.849,20	1.131,81	1.173,14		4.413,97	6.250,80	919,39	1.311,67	1.152,95							70.832,24	
236	Kab. Lumajang	13.856,54	4.823,93	1.979,42	4.247,52		5.265,37	3.233,50	1.423,26	953,12	1.353,75	2.209,97	6.104,07	951,77	1.007,79	1.178,91							48.874,36	
237	Kab. Madiun	21.516,22	2.624,99	1.712,96	1.934,26	2.901,50	4.675,03	2.902,27	1.073,08	1.131,21		1.192,01	4.069,58	714,69	1.076,12	1.324,37							49.168,36	
238	Kab. Magetan	18.736,24	2.990,28	1.704,62	2.935,01	2.969,32	5.413,29	4.550,55	1.118,10	1.207,87	3.776,02	1.095,96	4.200,24	1.028,78	968,44	1.212,60							54.252,59	
239	Kab. Malang	60.384,00	11.639,58	5.084,75			9.008,10	3.384,00	2.822,11	1.560,52		2.961,89	7.536,08		1.318,47	1.251,42		5.142,31					118.237,26	
240	Kab. Mojokerto	18.813,65	4.291,53	2.489,12	3.394,08		5.311,22	3.177,43	1.175,23	1.027,36	2.462,05	976,60	3.948,08	892,42	1.088,20	1.191,71			6.137,13				60.645,61	
241	Kab. Nganjuk	26.196,19	3.224,41	3.022,46	3.615,69		7.325,21	2.275,25	1.032,74	975,38	1.542,58	1.304,66	4.493,28	731,41	1.101,22	1.183,82							58.366,85	
242	Kab. Ngawi	25.093,32	4.785,47	2.308,58	2.634,02	3.163,32	8.150,96	4.510,01	1.584,21	917,45		1.503,30	5.261,20	881,16	1.316,84	1.397,58							63.804,47	
243	Kab. Pacitan	14.431,81	4.370,78	2.269,25	3.049,39		8.104,76	3.216,48	1.432,95	1.096,22	2.011,33	3.263,66	5.061,47	836,10	863,98	1.438,88							277,67	
244	Kab. Pamekasan	29.990,77	4.291,91	1.899,57	3.718,89	2.054,54	3.690,03	1.124,66	1.130,14	866,05		2.284,00	4.567,12	989,90	941,73	1.042,89	1.192,67	952,69					51.724,73	
245	Kab. Pasuruan	31.418,75	5.162,08		2.895,96		7.597,56	2.995,02	1.973,52	1.306,87		3.578,48	6.597,00	1.126,37	1.186,44								61.093,88	
246	Kab. Ponorogo	25.600,48	4.562,88	1.845,18	3.930,90	2.287,93	7.660,84	3.869,37	1.241,40	1.083,49		1.321,47	5.153,82	730,95	1.561,14	1.222,60							66.236,31	
247	Kab. Probolinggo	32.565,83	5.427,58	2.147,44	4.523,53	2.593,12	6.315,77	2.549,32	1.183,29	1.108,65	3.288,92	2.565,59	5.507,13	1.008,25	1.067,75	1.031,41							62.386,74	
248	Kab. Sampang	31.230,80	8.356,90	2.375,00	4.460,13		4.626,07	1.065,58	1.125,47	893,21	2.325,13	3.266,61	6.392,28	1.101,09	978,95	1.188,71	1.188,55	1.270,47				3.503,63	76.672,76	
249	Kab. Sidoarjo	21.700,38	6.303,26	3.712,25	8.460,80		9.294,90	2.881,69	1.974,16	1.690,59		4.838,62		1.192,91	1.153,01								76.672,76	
250	Kab. Situbondo	29.247,92	3.177,46	1.753,09	3.386,98	2.648,48	6.540,79	1.624,71	1.025,39	894,24		3.947,93	4.597,27	796,26	932,19	1.167,51	1.165,23						63.877,47	
251	Kab. Sumenep	36.458,07		3.044,29	5.115,35		9.225,93	3.661,00	1.902,33	1.172,24		4.869,43		1.090,37	1.077,82								17.527,97	
252	Kab. Trenggalek	19.811,93	3.976,23	2.100,29	2.786,87	3.120,23	5.407,71	1.967,62	1.647,99	954,47		4.224,33	4.362,70	998,44	917,84	1.237,20							67.924,85	
253	Kab. Tuban	29.580,32			4.180,06			2.612,34				4.665,42	6.441,02		1.018,75	1.308,92							53.829,88	
254	Kab. Tulungagung	24.961,85	3.225,31	2.110,97	3.153,52	2.519,89	11.480,65	2.936,04	1.961,87	1.095,61	3.381,96	3.138,11	4.566,77	1.276,11	1.169,88	1.266,76							49.806,83	
255	Kota Blitar	3.663,23	1.049,93	1.998,49	523,76		2.729,06	729,18	931,02	1.040,39	1.819,68	891,56		929,67	637,17								68.674,42	
256	Kota Kediri																							17.527,97
257	Kota Madiun	3.950,19	1.404,01	1.666,40	967,17	2.022,50	5.025,17		1.044,00	943,73		891,33		912,20	686,28								424,10	

(dalam juta rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN			INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SAR PRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL		
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN																				
258	Kota Malang				3.160,27			2.626,76	2.158,56	1.326,89				1.116,27	954,77				483,18		10.072,61			21.897,31		
259	Kota Mojokerto	3.292,11	1.232,95	1.627,62	789,50	2.012,81	2.191,01		761,46	793,97		782,29		653,35	629,72				697,11						15.463,90	
260	Kota Pasuruan	4.882,70	1.458,88	1.663,66	515,77		2.394,48		698,06	1.024,01		1.442,78	2.532,04	734,67	647,62				482,45						19.058,20	
261	Kota Probolinggo	8.009,96	1.304,21	2.544,98	862,85	2.024,86	4.095,73	1.691,39	1.238,28	1.308,28	2.121,66	2.777,08	2.456,19	1.127,75	805,03				447,92						32.816,17	
262	Kota Surabaya	22.024,76	9.558,99	2.619,64	10.621,88				3.250,33	1.767,03				1.558,74	1.221,39				604,80						53.227,56	
263	Kota Batu	3.871,22	1.492,84	1.658,87	1.253,64		2.407,92	737,72	809,65	994,60		863,47	2.609,44	688,81	595,40				261,01						18.244,59	
XVII	Provinsi Kalimantan Barat				8.580,61	18.251,62	11.691,68		5.389,13																43.913,04	
264	Kab. Bengkayang	12.925,26	5.338,85	3.217,69	1.194,05	2.295,90	9.808,60	2.932,15	1.670,98	783,46		3.515,51	5.763,31	990,78	812,13	1.142,86	1.848,32	1.082,45	212,41			4.532,56			60.067,27	
265	Kab. Landak	27.884,88	6.984,46	2.671,17	2.083,81	2.235,38	8.021,98	3.074,59	1.034,46	662,43		1.208,30	7.363,53	1.067,95	772,40	985,52	1.992,73	910,82	195,72						69.150,13	
266	Kab. Kapuas Hulu	14.967,60	7.358,14	3.011,04	1.953,75	3.912,65	10.481,77	3.021,21	1.205,76	629,03		3.825,46	5.380,01	1.272,11	1.128,52	1.239,40	2.304,87	1.213,61	182,08			14.392,35			77.479,36	
267	Kab. Ketapang	29.776,73	7.402,55	3.062,32	1.191,00	2.578,60	12.154,86	3.047,87	1.023,33	1.184,62		5.131,76	11.642,63	1.157,63	874,43				181,21						83.972,79	
268	Kab. Pontianak	11.063,48	2.897,28	2.192,80	1.940,98		6.530,40	2.270,10	1.180,72	839,06		5.810,24	3.890,12	1.406,73	711,88	1.278,12			213,20						42.225,11	
269	Kab. Sambas	14.003,62	8.637,31	2.158,16	3.522,80	2.786,48	8.090,98	2.974,14	1.355,83	928,64	5.986,31	6.102,33	8.151,09	1.077,83	913,86	1.272,75	2.431,68	2.178,44	220,20			11.679,80	4.621,82		89.094,07	
270	Kab. Sanggau	34.495,45	9.318,73	1.893,27	2.422,74	2.342,74	7.240,96	2.238,77	1.286,94	1.194,87	3.773,76	1.645,32	9.396,84	1.131,35	880,54	1.122,67	2.583,18	1.022,97	192,80						88.950,48	
271	Kab. Sintang	23.702,97	9.057,53	2.302,55	3.200,41		9.374,17	1.507,57	899,43	702,59		1.452,34	12.385,69	1.478,81	900,77	1.213,52	2.489,95	989,54	184,01			4.766,58			77.023,84	
272	Kota Pontianak	15.251,90	3.764,20	1.698,59	2.503,33		3.422,56	1.108,32	1.581,67	1.154,63		3.447,33	2.628,10	1.181,69	686,16				551,73		5.773,42				44.753,63	
273	Kota Singkawang	5.779,42	2.087,78	2.140,10	895,28		4.766,89	3.819,56	791,22	1.141,38	3.902,18	1.834,41	2.913,06	888,10	691,60	1.052,27		877,75	232,86						33.813,86	
274	Kab. Sekadau	34.668,26	4.303,88	2.406,38	1.587,32		9.164,21	1.130,66	2.262,93	1.048,97		1.477,77	9.572,52	1.957,29	708,86	1.347,98	1.649,80	1.036,56	193,93	782,63					75.269,95	
275	Kab. Melawi	17.173,96	4.660,18	1.755,01	774,10		9.078,96	1.001,82	968,60	642,63		1.217,31	6.435,16	1.093,35	743,44	1.218,29	1.779,25	1.014,57	188,28	703,68					50.448,59	
276	Kab. Kayong Utara	7.916,85	2.060,07	2.874,34	1.079,13		6.007,42	1.886,60	741,39	722,12	3.655,26	3.058,74	7.107,30	1.082,24	670,10	1.170,23	2.217,26	1.321,70	192,68						47.840,07	
277	Kab. Kubu Raya	36.552,84	3.569,48	3.295,38	4.115,19		6.531,18	3.095,25	822,48	1.062,56	6.373,69	3.987,63	7.564,98	1.660,86	712,13	1.329,04			183,36						80.856,05	
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah				21.266,71	23.777,00			5.140,57																50.184,28	
278	Kab. Barito Selatan	7.694,92	3.190,66	1.783,70	626,13	2.078,42	7.753,25	2.573,51	913,40	823,89	2.286,68	2.074,54	6.384,83	978,85			805,41	177,97							40.146,16	
279	Kab. Barito Utara	14.795,91	3.565,00	2.146,81	873,22		4.372,05	911,82	809,11	813,73		1.207,62	3.311,14	1.295,01					174,32						34.275,74	
280	Kab. Kapuas	17.277,67	8.200,72	1.834,84	1.881,76	2.155,82	18.815,55	3.346,44	1.099,23	749,60	1.641,76	2.694,14	9.476,72	1.415,40	958,30	1.081,40			186,81						72.816,16	
281	Kab. Kotawaringin Barat						11.249,93	3.398,68				3.863,49	9.427,05												27.939,15	
282	Kab. Kotawaringin Timur						14.089,78	5.567,06				3.776,04	5.945,27	1.442,29											30.820,44	
283	Kota Palangka Raya	4.882,04	2.397,94	1.825,12	789,19		7.843,74	750,52	1.057,44	1.015,97	1.993,27	1.866,10	3.379,60	1.199,89	792,34	1.314,17			196,04						31.305,37	
284	Kab. Barito Timur	5.855,08	2.826,44	1.774,30	580,55	2.647,59	4.792,15	838,80	930,81	799,74		1.154,05	6.544,62	999,57	778,88	1.327,94			191,77						32.042,29	
285	Kab. Murung Raya													1.423,41												1.423,41
286	Kab. Pulang Pisau	10.902,75	4.441,24	2.162,72	820,03		5.960,67	3.208,11	826,22	771,89	3.023,99	2.623,11	5.796,88	891,00	720,09	1.309,63			185,21						43.643,54	
287	Kab. Gunung Mas	7.856,64	3.725,50	1.904,41	731,70	2.172,21	5.789,49	834,62	809,23	638,77	1.794,78	1.698,73	5.817,98	1.085,61		996,13			181,24	680,66					36.717,70	
288	Kab. Lamandau	4.157,21	2.015,19	2.433,90	718,13		7.264,28	1.190,82	766,66	720,32		1.058,55	9.565,61	1.859,08	702,78			935,27	183,37	610,08					34.181,25	
289	Kab. Sukamara	4.378,56	1.215,01	1.983,18	545,19		4.444,33	983,56	759,54	773,73		1.832,08	3.594,16	785,45	701,17	1.275,02		971,32	194,50						24.436,80	
290	Kab. Katingan											3.769,55		1.991,09	1.019,70											6.780,34
291	Kab. Seruyan	6.562,41	2.156,29	1.915,11	1.524,22	2.211,05	12.865,26	2.559,62	978,30	851,61		2.769,34	6.970,04	1.135,80	795,91				877,55						48.655,53	
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan				4.315,81	17.995,54	12.192,55		3.066,94																38.848,25	
292	Kab. Banjar	8.541,30	7.088,79	2.245,63	2.852,56		6.554,01	1.692,11	699,80	921,04		7.592,32	6.532,49	1.516,55	970,21	1.306,78			199,02		5.359,31				54.071,92	
293	Kab. Barito Kuala	19.652,94	7.090,20	1.754,34	1.241,14		6.774,57	2.782,85	735,56	920,40		2.686,78	7.675,56	973,34	906,28	1.135,37	2.302,76		211,70		5.825,94				62.669,73	
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	8.263,86	4.764,64	1.701,60	652,84		5.681,16	2.735,47	719,49	705,48		6.315,92	4.901,44	1.651,54	719,43	1.178,43			226,28						40.288,58	
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	7.515,63	2.391,70	1.722,40	765,66		5.123,09	1.915,39	724,60	955,65		1.871,97	5.108,83	1.356,77	785,77				231,40						31.467,53	
296	Kab. Hulu Sungai Utara	11.120,61	2.310,19	2.578,52	1.793,27		7.403,12	3.107,62	2.804,11	895,75		5.324,15	4.158,16	1.013,26	842,91	1.240,44	1.647,03	1.141,22	247,59						47.627,95	
297	Kab. Kotabaru						8.111,86					5.564,59	7.156,18	1.167,79	922,81	1.342,51									24.265,74	
298	Kab. Tabalong											3.635,25		1.303,62												4.938,87
299	Kab. Tanah Laut		5.335,34					2.769,40				4.035,60	5.548,30	1.724,29	960,02										20.372,95	
300	Kab. Tapin	3.949,16	3.389,17	1.912,80	970,90		5.457,93	826,12	780,87	744,03		1.882,63	7.540,42	831,24	781,20				196,92						29.263,39	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	DAERAH	PENDIDIKAN					KESEHATAN					INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINJUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN																				
301	Kota Banjarbaru	3.898,88	1.172,56	1.852,41	931,68			5.954,14	1.379,12	1.233,04	1.237,67				1.222,58	2.650,35	834,71	662,05					240,82			3.657,45			26.927,46
302	Kota Banjarmasin	19.695,01	2.701,94	1.707,87	2.024,75			4.619,76		1.059,23	953,09						1.159,31	797,78				552,76	815,56			5.757,08			41.844,16
303	Kab. Balaian																	1.405,10											3.207,28
304	Kab. Tanah Bumbu							10.661,50			1.125,26				3.134,09	5.862,68	1.190,72												21.974,25
XX	Provinsi Kalimantan Timur							25.371,52							8.008,78		1.190,72				1.235,83								34.616,13
305	Kab. Berau														3.965,16		1.554,71												5.519,87
306	Kab. Bulungan														6.289,87		1.355,51												7.645,38
307	Kab. Kutai Kartanegara	23.784,19	10.192,24					10.629,28	3.986,56	1.585,48																			50.178,15
308	Kab. Kutai Barat	16.545,99	5.944,28	2.171,83	747,22	2.215,53		19.217,49	3.484,71	624,26	930,17				1.948,92	5.722,93	1.361,10				2.008,10	1.033,12	176,43			3.970,46	4.508,91	72.611,45	
309	Kab. Kutai Timur							10.429,25							3.860,38														14.289,63
310	Kab. Malinau	11.810,49	2.068,12	1.826,20	572,24	2.197,46		11.452,06	691,44	652,52	618,28			1.590,46	3.956,90	1.333,01					2.413,36	1.090,88	173,10			7.021,50	49.468,02		
311	Kab. Nunukan	8.678,27	3.901,63	1.805,63	1.113,71	2.477,73		5.431,42	3.039,75	726,22	702,35			7.013,79	3.910,46	1.339,35	859,84				1.869,48	1.026,81	188,03			13.350,61	57.435,08		
312	Kab. Paser								3.484,09						3.913,55														7.397,64
313	Kota Balikpapan									3.321,68							1.305,57					940,34							13.459,30
314	Kota Bontang																												
315	Kota Samarinda																												4.361,08
316	Kota Tarakan																												
317	Kab. Penajam Paser Utara																												4.136,74
318	Kab. Tana Tidung																												6.166,53
XXI	Provinsi Sulawesi Utara							4.122,64	16.532,67	15.752,34					6.189,42						942,86							43.539,93	
319	Kab. Bolaang Mongondow	22.978,03	2.702,70	1.911,69	1.897,45	2.934,25		8.197,27	2.915,29	1.410,27	840,78	6.712,98		4.115,50	4.619,46	1.271,68	798,95	1.209,74				3.573,90	218,20					68.308,14	
320	Kab. Minahasa	10.685,83	4.420,94	2.305,31	2.274,77			4.921,15	1.524,09	875,70	966,60	3.758,99		5.551,37	5.446,84	1.190,91	920,21	1.462,51										46.571,08	
321	Kab. Kepulauan Sangihe	15.600,52	4.580,78	2.124,75	2.293,48	3.936,53		9.953,02	2.281,60	973,89	1.154,88			4.416,34	6.475,79	1.027,22	939,20	1.179,80	1.913,76			1.309,94	348,26					60.509,76	
322	Kota Bitung	7.595,98	2.257,91	1.735,49	1.221,30	2.168,51		5.705,74	722,43	1.148,22	971,44			2.561,43		994,88	734,17	1.311,80										33.009,51	
323	Kota Manado	12.570,43	4.725,03	2.243,82	2.895,34			6.679,85	682,57	1.702,34	1.368,03			2.646,57		1.395,42	839,41	1.211,20										44.229,50	
324	Kab. Kepulauan Talaud	11.753,23	3.725,98	1.883,64	1.571,07	2.488,09		5.572,63	1.457,17	1.210,38	1.095,45	5.325,79		6.497,65	5.219,47	1.207,30	931,05	1.153,67	1.580,74			1.207,34	233,53			4.839,04		54.114,18	
325	Kab. Minahasa Selatan	13.990,53	4.738,47	2.508,01	1.205,19			13.746,06	1.706,25	1.191,61	1.325,87			2.614,62	5.393,45	806,65	850,75	1.298,05										236,11	
326	Kota Tomohon	3.784,47	2.225,69	2.245,62	578,15			3.932,05	845,18	771,00	963,88	3.198,26		1.184,67	3.077,09	989,69	735,90	1.338,25				787,95	296,30					26.955,15	
327	Kab. Minahasa Utara	16.375,49	3.497,77	1.779,22	1.609,78	2.231,87		7.178,34	2.855,38	911,15	959,96			5.515,78	3.614,34	999,47	871,73	1.473,79				910,98	252,63			5.604,97	3.950,72	60.593,37	
328	Kota Kotamobagu	5.708,62	1.314,10	1.778,92	1.314,35	2.593,96		5.126,69	884,44	726,26	825,48			1.318,61		592,55	688,71	1.038,03					415,28					24.267,00	
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.152,22	1.200,10	2.992,26	1.196,75	2.066,52		6.665,31	874,95	699,54	773,66			4.057,68	3.384,26	698,76	652,05	1.225,39					219,88					33.859,33	
330	Kab. Kepulauan Sitaro	10.448,26	3.413,75	1.948,53	1.649,52	5.175,06		4.654,01		822,12	1.203,80			1.901,73	3.552,15	709,10	767,08				1.351,19	1.104,70						39.022,59	
331	Kab. Minahasa Tenggara	16.549,09	1.876,94	1.700,21	1.349,70			7.976,89	1.382,37	1.117,61	915,62	1.914,72		3.145,75	7.354,15	1.550,86	750,70	1.488,52					232,27					49.305,40	
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur	5.356,23	1.461,00	2.278,62	1.207,68			4.739,45	893,09	705,39	652,12			1.801,07	3.430,48	941,67	655,60	1.145,72					212,77				3.403,71	28.884,60	
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6.589,21	1.805,33	3.134,24	1.805,36			3.161,59	916,41	710,17	646,66			2.912,73		705,62	656,62	981,26					187,02					24.212,22	
XXII	Provinsi Gorontalo							10.915,65	9.032,63					4.060,05															24.008,33
334	Kab. Boalemo	6.951,51	3.844,35	1.896,80	1.264,20			7.093,55	1.567,79	919,72	739,92			2.709,42	3.527,82	1.036,96	718,57	1.282,81	1.314,26			1.115,04	247,75					36.230,47	
335	Kab. Gorontalo	13.542,83	8.021,24	2.105,29	2.434,81	3.200,00		12.286,10	2.064,12	1.201,58	1.029,09			3.315,37	4.732,78	986,40	857,11	1.364,21					277,89					57.518,82	
336	Kota Gorontalo	5.046,08	1.771,25	1.832,78	795,72	2.828,39		8.800,65	2.149,61	1.915,90	1.279,04			1.884,06	2.671,28	1.090,30	672,50	1.193,33				618,60	400,41					34.949,90	
337	Kab. Pehuawato	7.281,10	3.174,71	1.997,06	1.234,26	2.213,52		8.018,47	1.002,21	1.038,84	858,97			3.159,05	5.430,57	1.070,53	745,80	1.446,45	1.217,28			970,67	206,19					41.065,68	
338	Kab. Bone Bolango	6.536,02	1.718,50	1.730,39	884,11			6.015,40	772,99	860,37	850,82			2.515,68	3.526,55	907,80	774,19	1.301,09				1.349,04	206,99			3.940,83		33.890,77	
339	Kab. Gorontalo Utara	11.146,21	2.083,05	1.847,76	1.256,83			6.038,57	1.385,98	867,38	859,86			2.063,52	3.987,25	4.167,99	929,59	694,54	1.463,96	1.399,23		1.143,75	212,01					41.547,48	
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah							5.654,68	13.290,00	16.326,30				6.488,15								1.477,94						43.237,07	
340	Kab. Banggai	17.764,21	4.667,72	2.666,56	1.519,28			12.149,44	3.419,43	953,98	979,58			5.052,80	5.595,41	1.075,04	967,94	1.213,18	1.428,55			1.873,76	203,20					61.530,08	

(dalam juta rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN		INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKAMAN										TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI						PELAYANAN RUJUKAN	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKAMAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	
341	Kab. Banggai Kepulauan	13.000,76	5.850,24	1.783,46	1.159,07	2.996,84	11.815,36	1.316,26	1.459,70	1.806,88	7.058,06	3.272,27	1.150,68	1.053,23	1.227,69	1.321,81	1.161,46	221,51	57.895,18		
342	Kab. Bontol	13.731,28	2.774,43	2.118,29	1.043,21	6.193,88	6.193,88	1.948,64	913,84	845,38	2.087,75	3.734,25	1.089,42	805,52	1.287,91	1.249,57	1.128,49	207,76	40.479,64		
343	Kab. Toli-Toli	9.485,04	4.103,81	1.822,67	1.347,03	6.068,47	6.068,47	1.867,64	1.105,62	921,16	2.854,94	4.438,98	703,17	885,34	1.233,74	1.192,55	1.054,02	204,88	39.289,06		
344	Kab. Donggala	28.116,87	4.709,39	1.806,97	2.125,63	3.235,55	3.235,55	1.105,31	987,81	967,81	7.745,29	6.480,03	1.320,55	905,35	1.312,47	1.287,52	1.156,04	212,20	69.147,08		
345	Kab. Morowali	14.523,83	4.086,83	2.100,83	897,62	3.730,39	3.730,39	1.244,65	876,22	749,46	4.479,59	4.130,34	882,39	953,24	1.291,27	1.690,08	1.305,44	189,75	55.359,11		
346	Kab. Polewa	19.510,26	2.260,84	2.104,21	1.911,03	4.203,57	11.556,97	2.477,14	1.293,45	1.004,18	1.848,52	6.061,28	1.212,59	929,24	1.228,57	1.282,13	1.120,28	204,43	6.922,34		
347	Kota Palu	15.053,09	2.703,78	1.911,03	1.112,58	2.646,70	4.027,59	823,01	824,41	942,60	1.760,76	2.892,84	1.321,72	971,61	1.360,11	1.390,11	1.023,66	205,73	3.809,40		
348	Kab. Parigi Moutong	18.558,45	2.997,85	2.180,81	1.829,18	2.564,32	3.239,53	1.168,43	935,49	905,26	4.176,33	9.236,69	1.009,13	864,66	1.293,48	1.438,71	1.063,18	218,60	42.362,30		
349	Kab. Tana-Tana	9.713,26	2.552,03	1.937,18	1.322,31	2.954,84	4.092,83	1.168,43	1.005,63	899,39	3.202,82	3.176,95	939,93	863,53	1.282,70	1.438,71	1.063,18	218,60	51.759,15		
350	Kab. Sigi	26.617,56	2.667,23	2.895,30	2.412,35	14.231,62	12.154,22	12.115,44	870,38	797,75	3.578,34	3.887,32	917,02	764,97	1.260,44	1.122,20	946,41	182,58	51.218,61		
351	Kab. Bantuaeng	7.692,08	2.686,15	1.747,81	1.207,13	3.382,13	4.178,22	3.097,79	648,67	740,27	3.054,62	4.286,27	1.770,00	688,75	1.128,88	1.187,24	1.068,61	285,55	328,96		
352	Kab. Barru	15.045,11	2.972,28	2.111,68	952,91	3.382,13	5.196,08	2.401,15	633,24	758,58	2.087,18	3.501,57	771,59	862,43	1.195,16	1.256,07	1.195,16	238,19	42.774,47		
353	Kab. Bone	43.507,03	10.047,23	2.535,62	3.777,71	2.757,18	9.446,99	4.101,49	910,75	888,86	4.971,93	3.135,38	990,63	866,47	1.256,07	1.256,07	1.256,07	229,23	82.032,28		
354	Kab. Bulukumba	9.630,16	6.188,92	2.053,36	986,52	3.653,73	9.671,28	3.258,73	973,15	917,76	4.020,01	6.919,28	803,15	867,11	1.471,96	1.471,96	1.471,96	305,59	49.442,57		
355	Kab. Enrekang	11.259,29	2.702,95	2.639,52	979,54	2.135,87	5.467,58	2.217,91	693,00	840,78	1.495,17	5.446,11	2.023,22	775,04	1.225,02	1.225,02	1.225,02	237,23	51.722,21		
356	Kab. Gowa	13.189,00	7.108,56	1.980,79	3.204,73	2.203,34	12.781,01	2.856,64	1.107,11	799,35	1.647,63	4.721,01	828,11	760,27	1.183,52	1.079,86	1.078,12	305,09	42.116,08		
357	Kab. Jenebera	22.942,02	5.236,00	2.322,51	2.059,50	2.361,95	6.559,50	2.652,02	791,18	745,13	3.074,28	6.443,42	881,37	746,87	1.195,39	1.079,86	1.078,12	226,53	54.785,16		
358	Kab. Luwu	11.862,81	4.022,45	2.615,33	2.055,00	8.183,50	8.183,50	2.326,52	775,84	788,75	3.525,20	5.379,82	1.149,56	700,67	1.233,70	1.233,70	1.233,70	201,37	61.885,78		
359	Kab. Luwu Utara	9.627,33	3.952,34	2.370,65	1.344,98	7.611,15	7.611,15	2.731,45	772,35	723,34	4.924,48	4.318,50	992,18	788,55	1.155,74	1.155,74	1.155,74	201,37	43.316,12		
360	Kab. Marauke dan Kepulauan	12.448,73	3.237,66	2.224,19	888,70	2.543,13	6.421,18	1.487,83	781,29	710,23	6.179,51	3.607,77	953,63	779,73	1.379,72	1.183,42	1.068,61	257,47	49.906,49		
361	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10.587,62	2.919,82	2.435,84	1.703,95	2.984,83	6.593,83	1.456,84	722,23	775,63	5.092,62	3.411,60	1.108,00	812,00	1.177,35	1.443,26	1.092,21	244,07	3.569,21		
362	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10.092,59	4.972,62	3.094,30	801,30	5.832,62	7.520,15	2.877,50	725,62	849,20	5.092,62	3.411,60	1.108,00	812,00	1.177,35	1.443,26	1.092,21	244,07	46.580,00		
363	Kab. Kepulauan Selayar	12.320,71	4.972,62	3.094,30	801,30	5.832,62	7.520,15	2.877,50	725,62	849,20	5.092,62	3.411,60	1.108,00	812,00	1.177,35	1.443,26	1.092,21	244,07	46.580,00		
364	Kab. Selayar	8.559,18	2.852,34	2.100,28	1.071,83	2.161,52	6.684,60	2.892,41	720,62	769,47	3.897,60	4.132,55	1.490,58	712,87	1.086,81	1.086,81	1.086,81	237,85	38.021,79		
365	Kab. Soppeng	9.547,97	2.492,86	1.733,22	759,78	2.161,52	6.321,84	2.892,41	702,82	746,83	1.906,86	4.786,83	733,19	739,43	1.074,01	1.074,01	1.074,01	302,84	41.347,48		
366	Kab. Takalar	15.462,84	5.646,67	1.838,30	1.356,95	3.324,67	5.025,67	1.241,17	707,70	748,42	4.138,22	3.717,18	835,63	820,90	1.095,25	1.095,25	1.095,25	338,25	33.832,04		
367	Kab. Tana Toraja	31.613,84	3.849,20	2.442,82	1.811,11	7.440,81	7.440,81	2.044,01	1.004,11	784,92	1.819,92	6.049,82	1.059,93	810,10	1.539,93	1.539,93	1.539,93	298,26	64.635,80		
368	Kab. Wajo	33.644,51	5.536,77	2.215,70	2.319,39	3.472,36	8.428,24	1.487,83	781,29	752,41	4.470,97	5.800,49	944,83	865,85	1.177,59	1.177,59	1.177,59	233,40	74.833,02		
369	Kab. Pangkep	22.666,00	2.094,14	2.944,41	700,61	6.702,32	1.801,55	1.801,55	1.829,81	1.329,81	4.440,44	3.460,90	1.613,17	783,07	1.166,79	1.059,88	1.204,90	243,97	50.919,23		
370	Kota Makassar	7.228,35	3.110,86	5.085,99	5.085,99	8.205,40	8.205,40	1.668,33	1.329,16	1.329,16	4.440,44	3.460,90	1.613,17	783,07	1.166,79	1.059,88	1.204,90	243,97	32.646,32		
371	Kota Makassar	10.048,04	2.004,67	1.874,25	1.129,47	2.361,26	3.988,45	1.099,09	934,72	866,74	4.440,44	3.460,90	1.613,17	783,07	1.166,79	1.059,88	1.204,90	243,97	32.646,32		
372	Kota Palopo	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25		
373	Kab. Luwu Timur	7.775,08	1.594,61	2.445,03	667,33	10.964,83	10.964,83	4.548,08	633,12	666,42	1.819,92	4.887,67	1.875,17	650,44	1.272,23	1.272,23	1.272,23	195,32	38.000,33		
374	Kab. Tana Toraja	14.486,67	5.055,55	3.938,81	2.689,25	8.175,69	8.175,69	1.829,82	911,41	588,03	1.612,91	6.179,62	1.816,72	745,61	1.306,63	1.172,80	1.577,97	267,70	52.577,99		
375	Kab. Majene	15.578,44	2.906,91	1.774,41	1.537,44	2.387,45	7.982,73	2.291,94	1.006,83	1.144,83	4.440,44	3.460,90	1.613,17	783,07	1.166,79	1.059,88	1.204,90	243,97	36.786,28		
376	Kab. Mamuju	20.841,78	2.985,96	1.747,21	2.386,89	2.555,42	10.949,80	2.431,57	975,38	707,28	4.440,44	3.460,90	1.613,17	783,07	1.166,79	1.059,88	1.204,90	243,97	52.919,23		
377	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	25.066,04	3.023,12	3.023,12	2.273,33	7.719,98	9.920,80	3.289,50	920,20	853,82	3.795,49	4.128,20	1.184,32	815,44	1.176,72	1.481,30	1.264,51	199,18	60.433,23		
378	Kab. Mamasa	35.133,35	5.887,65	3.333,63	1.586,49	2.322,39	6.638,66	2.589,45	950,69	759,63	4.659,13	4.259,33	1.158,42	834,34	1.492,02	1.461,46	1.391,27	211,51	72.522,66		
379	Kab. Mamuju Utara	14.522,31	2.429,05	1.823,22	1.958,38	2.174,38	4.678,02	1.484,19	728,18	756,89	6.236,43	3.061,39	924,10	681,07	1.304,13	1.274,43	924,10	190,28	47.971,95		
380	Kab. Bittou	23.599,47	7.732,72	2.408,76	1.765,64	5.639,45	14.705,40	12.980,28	1.061,84	1.077,73	5.117,67	5.036,87	1.173,87	913,29	1.589,20	1.589,20	1.589,20	231,42	34.659,92		
381	Kab. Konawe	14.486,67	4.140,61	3.738,62	1.845,85	2.240,64	5.639,45	4.538,28	822,56	884,66	5.498,41	5.792,64	1.098,79	1.209,50	1.376,04	1.611,77	1.376,04	200,44	59.187,25		
382	Kab. Kolaka	13.971,91	7.615,44	2.670,92	1.394,34	8.646,50	3.138,60	889,51	904,42	904,42	4.769,41	4.837,54	1.280,20	996,15	1.373,46	1.373,46	1.373,46	200,44	52.613,84		
383	Kab. Muna	29.658,50	5.905,72	3.041,45	3.562,58	7.831,96	1.507,59	972,56	872,34	3.833,87	5.529,15	6.046,78	1.144,85	1.230,28	1.316,05	1.686,32	1.686,32	332,03	80.745,00		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN			INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARJA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN																		
384	Kota Kendari	6.062,68	3.449,25	2.538,46	946,36		6.814,32	2.107,54	1.119,06	1.049,19	2.654,30	2.890,66	2.932,40	1.066,29	809,34	1.204,56		645,01	276,00		5.682,80			42.248,22
385	Kota Bau-bau	8.936,03	2.096,40	1.739,15	970,86		5.173,30	1.011,80	775,11	1.100,85		2.497,56	2.884,36	1.265,11	711,79	1.287,48			239,95		3.973,52			34.663,27
386	Kab. Konawe Selatan	13.713,20	4.165,46	2.267,56	1.917,09		10.291,89	5.596,73	1.151,49	1.364,79		3.935,81	5.659,87	2.005,08	1.064,38	1.428,89	1.490,37		1.325,84	204,31		4.439,06		66.988,47
387	Kab. Bombana	15.752,71	2.949,13	2.761,46	1.338,13	2.517,85	7.455,68	1.267,99	906,03	904,32		4.208,81	4.017,53	812,32	822,20	1.085,80	1.350,36		1.324,62	218,44				49.693,38
388	Kab. Wakatobi	9.330,56	3.415,47	2.304,50	1.550,61	2.327,29	7.371,44		850,87	889,30		6.924,78	3.841,58	861,46	821,64	1.415,84	1.365,89		1.311,49	268,64				44.851,26
389	Kab. Kolaka Utara	10.151,80	2.219,34	2.850,70	1.675,72		7.320,49	1.325,62	903,23	978,97		3.857,63	3.009,54	1.076,36	809,11	1.287,95	1.203,78		1.189,72	203,33				40.063,29
390	Kab. Konawe Utara	10.805,39	2.522,38	3.227,56	1.572,27	2.181,43	5.996,36	917,31	653,03	758,22	2.127,77	2.817,89	3.848,67	743,83	950,69	1.230,84	1.466,59		1.397,54	180,71				43.398,48
391	Kab. Buton Utara	10.372,88	2.931,84	2.501,69	1.562,52	2.215,35	7.148,55	938,83	666,25	769,99		1.820,33	3.060,94	764,81	705,47	1.477,66	1.457,04		1.963,21	205,34				40.562,70
XXVII	Provinsi Bali					3.399,18	12.777,65	12.423,39				4.518,82						906,87						34.025,91
392	Kab. Badung															1.399,24			439,08					1.838,32
393	Kab. Bangli	4.927,34	3.347,57	1.884,47	1.727,87	2.609,10	7.256,43	2.786,17	1.076,45	864,29		1.671,50	3.674,41	814,68	762,54	1.107,62			310,79				38.259,25	
394	Kab. Buleleng	18.133,33	5.361,34	1.911,63	3.223,70	2.792,74	8.528,31	3.760,18	1.026,82	1.278,07	3.865,38	3.078,08	5.046,08	1.052,36	1.057,22	1.215,18		964,03	294,75			3.438,02	62.589,20	
395	Kab. Gianyar	8.234,20	2.538,30	1.700,09	2.446,50		5.840,18	4.615,00	726,93	914,83		1.586,88	3.309,86	991,56	833,29	1.157,27		586,34	448,97					35.930,20
396	Kab. Jembrana	6.732,23	1.846,57	3.408,45	1.805,24	2.279,29	8.820,75	3.283,11	748,95	951,86		2.759,35	3.378,36	820,53	738,24	1.215,41		1.076,71	305,30					40.170,35
397	Kab. Karangasem	11.166,24	4.578,60	1.729,16	2.247,43	3.051,28	7.034,42	3.496,63	1.184,76	1.130,40		2.641,42	4.197,77	952,99	849,40	1.203,59		994,54	306,03					46.764,66
398	Kab. Klungkung	4.395,12	1.936,42	1.776,50	1.377,96	2.697,00	6.664,93	2.933,08	1.116,70	913,71		2.899,85	3.168,64	917,86	763,33	1.164,28			369,77					33.095,15
399	Kab. Tabanan	13.454,88	2.117,80	1.731,32	2.817,44	2.647,04	8.033,22	5.041,25	1.079,17	1.238,44		1.854,45	4.090,60	949,98	824,99	1.189,12			296,84					47.366,54
400	Kota Denpasar			2.706,84	3.976,84					1.222,17									583,50					8.489,35
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat					7.293,17	18.984,10	20.701,24				5.597,41				750,42								53.326,34
401	Kab. Bima	17.241,98	3.669,51	1.864,66	2.415,54	3.749,80	6.936,24	3.199,62	1.478,42	1.337,67		2.922,61	4.210,46	882,61	976,88	1.245,79	1.941,80		1.036,52	232,70	4.013,91		4.036,66	63.393,38
402	Kab. Dompu	8.804,95	3.582,93	1.898,18	1.731,90	3.155,95	7.951,50	3.593,19	884,06	936,38		3.130,91	3.941,64	841,46	805,55	1.219,12	1.146,16		1.060,98	217,84				44.901,70
403	Kab. Lombok Barat	19.369,50	3.479,00	3.715,16	2.358,09	2.667,48	6.744,65	4.079,35	1.161,11	1.303,82		3.947,14	5.152,87	872,47	1.032,09	1.441,59	1.091,82		1.926,68	312,63	3.723,46			60.378,91
404	Kab. Lombok Tengah	28.758,00	4.599,62	2.008,50	4.206,03	3.111,01	7.122,14	3.359,21	2.209,25	2.396,76		3.653,30	6.341,09	798,45	1.017,42	1.293,10	1.231,71		1.298,44	337,82		691,42		74.433,27
405	Kab. Lombok Timur	38.464,20	7.716,11	2.729,04	4.904,66	3.345,80	11.516,20	5.487,32	1.669,94	1.541,17	3.117,16	4.432,08	5.248,61	954,44	1.124,21	1.379,77	1.444,35		5.312,16	369,15		694,36		101.450,73
406	Kab. Sumbawa	22.127,76	4.190,30	2.057,73	1.398,18	3.412,98	7.430,51	2.863,96	1.237,79	1.412,21		5.236,79	5.595,31	682,05	1.065,82	1.189,53	1.315,72		1.817,21	205,04				63.238,89
407	Kota Mataram	7.770,04	2.375,28	2.570,87	730,22	2.963,80	5.198,28	1.055,22	1.050,53	1.442,37		1.802,80		1.047,92	774,83				644,52					29.436,68
408	Kota Bima	17.187,44	3.416,42	1.793,09	1.146,24		3.131,05	721,90	823,74	950,16	1.843,39	1.939,59	2.707,12	891,20	690,70				231,66		3.439,50			40.913,20
409	Kab. Sumbawa Barat	4.181,97	2.533,39	1.973,51	689,46		5.171,02	1.015,14	819,73	933,34		2.922,07	3.535,16	850,55	785,29		1.185,83	1.023,80	838,14	194,37				28.651,77
410	Kab. Lombok Utara	8.551,28	2.306,93	6.286,50	1.445,39		3.790,71	1.267,60	756,44	933,92		2.256,54	3.442,25	674,72	669,92	1.153,41	1.018,71		1.082,77	220,25			3.295,76	39.153,12
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur						24.095,86	24.772,26				7.446,63				774,20								57.088,95
411	Kab. Alor	13.252,92	4.576,50	2.249,45	2.312,50	2.491,73	12.880,62	4.106,38	1.129,16	1.318,10	4.986,81	2.763,93	5.305,57	1.319,35	958,43	1.454,81	1.643,34		2.209,22	254,14	1.078,38			66.290,94
412	Kab. Belu	53.281,56	3.993,43	1.845,51	2.301,54	2.303,35	7.398,12	2.055,78	1.156,60	1.015,75	2.893,49	3.700,19	6.124,45	1.212,91	1.112,85	1.371,64	1.492,45		1.172,10	238,81	1.267,03		7.048,96	107.588,23
413	Kab. Ende	36.359,44	9.425,20	2.572,14	1.998,22		7.144,38	2.395,26	1.088,55	1.053,22		1.342,33	4.471,22	1.219,05	1.220,47	1.250,61	1.518,91		2.197,66	251,99				75.508,65
414	Kab. Flores Timur	17.446,95	6.074,07	2.043,53	1.727,25	2.894,18	7.211,86	1.527,47	1.151,09	1.327,74	2.160,83	2.839,03	5.059,92	874,83	869,02	1.262,79	1.402,29		1.214,68	251,10				57.338,43
415	Kab. Kupang	27.807,87	5.888,26	1.875,57	1.995,19	2.345,65	5.525,21	4.213,62	1.068,37	885,02		3.579,92	6.145,99	1.233,68	922,22	1.293,52	1.413,71		6.013,71	216,46	1.055,62		4.407,54	77.887,13
416	Kab. Lembata	12.037,85	3.213,93	1.855,97	1.161,17	2.432,71	6.840,60	1.499,13	807,53	868,19	6.719,31	2.615,05	4.242,15	1.134,61	795,41	1.384,22	1.304,27		1.300,11	265,24				50.477,45
417	Kab. Manggarai	14.178,24	5.799,40	2.300,48	2.200,98	2.262,14	6.930,77	2.886,78	1.321,95	1.114,51		1.625,51	4.861,75	1.046,25	921,82	1.328,87	1.466,45		1.143,53	244,70	1.241,41			53.719,44
418	Kab. Ngada	8.385,59	4.841,36	1.831,99	1.237,96	2.728,17	6.779,20	3.447,26	819,31	750,35	4.433,22	1.235,59	4.579,42	1.662,23	804,62	1.461,91	1.490,56		1.085,64	250,47				47.824,85
419	Kab. Sikka	13.724,20	5.767,55	1.870,52	1.595,38		7.152,53	1.511,76	1.321,65	976,33		2.220,79	6.128,24	1.041,35	918,28	1.307,10	1.563,72		681,08	263,21				48.043,69
420	Kab. Sumba Barat	5.883,37	2.527,45	1.855,94	2.141,80	2.375,84	5.034,06	2.758,82	815,97	756,26		2.730,30	4.754,18	1.096,74	703,35	1.524,41	1.354,10		213,64	1.226,43				37.752,66
421	Kab. Sumba Timur	21.405,44	3.487,61	1.877,39	1.331,96	2.896,99	8.186,64	2.746,81	933,36	830,74		3.512,66	10.012,58	1.180,92	861,44	1.408,87	1.500,63		1.078,15	208,24				64.087,08
422	Kab. Timor Tengah Selatan	10.281,29	10.857,91	1.939,98	2.794,85		8.709,85	2.415,90	1.133,76	849,88	1.865,70	2.466,45	8.091,95	1.046,25	983,35	1.414,13	1.535,69		1.087,49	231,82	1.059,71			58.765,96
423	Kab. Timor Tengah Utara	12.982,56	4.106,21	1.869,29	1.638,14		15.164,26	2.892,02	937,60	874,04	4.629,93	1.336,42	6.846,25	1.134,14	875,91	1.324,45	1.456,33		1.160,19	238,45				69.333,94
424	Kota Kupang	6.464,29	1.860,06	2.153,77	1.437,15		6.884,99	1.166,62	859,88	991,75		2.191,15	2.788,13	979,03	870,76	1.162,46			847,75			8.910,09		31.257,79
425	Kab. Rote Ndao	8.028,84	2.006,14	1.860,39	1.756,60		4.439,15	3.219,35	849,59	701,78		2.299,34	4.759,16	1.147,72	796,02	1.421,55	1.616,40		1.042,79	233,72				36.178,54
426	Kab. Manggarai Barat	15.157,38	2.103,88	1.830,34	1.370,00		6.046,62	4.251,62	842,64	700,43		1.463,17	4.552,24	1.542,88	1.138,99	1.262,96								



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(dalam juta rupiah)

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN					INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRTIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN																				
427	Kab. Nagekeo	17.430,80	4.611,38	2.065,85	1.350,94		7.494,43	2.584,66	841,74	1.018,58	3.640,05	1.638,39	5.327,22	1.107,21	731,80	1.491,79	1.217,22	1.042,12	233,01	831,75				4.320,93	58.979,87	
428	Kab. Sumba Barat Daya	21.314,97	3.195,46	3.759,26	1.379,89		7.861,25	2.244,43	964,76	689,40		1.720,66	5.093,02	1.096,89	850,92	1.414,69	1.354,26	1.501,22	254,04	1.369,19					56.064,31	
429	Kab. Sumba Tengah	5.682,92	1.810,06	2.428,87	1.585,17		4.852,20	799,82	750,64	559,19	3.763,26	3.066,08	8.986,83	999,66	657,25	1.638,79	1.450,95	1.143,27	199,40	1.162,88					41.537,24	
430	Kab. Manggarai Timur	50.787,41	4.757,99	2.570,26	2.076,75		9.598,98	2.780,06	1.141,19	1.889,76	1.446,20	2.669,38	5.057,33	1.670,93	758,93	1.285,66	1.511,59	1.110,36	228,37	1.109,50				4.567,90	97.018,55	
431	Kab. Sabu Raijua	17.504,83	4.408,08	2.262,00	2.858,68		6.647,19	2.254,77	1.039,28	912,83		3.720,70	4.330,64		822,99	1.306,82	1.686,82	1.246,60	295,70	1.566,31					52.864,24	
XXX	Provinsi Maluku					3.728,71	15.313,90	11.365,25				7.654,82													38.062,08	
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	14.712,28	3.167,47	2.269,61	1.429,65		6.314,77	1.038,67	934,80	843,45		4.660,12	3.423,02	1.142,81	761,55	1.434,15	1.771,71	1.159,12	210,57						45.273,75	
433	Kab. Maluku Tengah	18.024,35	8.945,21	2.625,36	2.934,43		7.962,40	1.927,12	1.207,81	994,33		3.514,25	5.375,43	1.121,89	1.041,12	1.435,40	1.468,63	718,80	219,34						59.515,87	
434	Kab. Maluku Tenggara	12.886,11	2.053,42	2.048,95	1.710,63		4.585,20	1.664,73	826,29	842,63		5.529,72	3.794,72	1.761,20	838,60	1.416,41		1.040,10	237,10						41.235,81	
435	Kab. Buru	8.629,96	3.525,78	2.367,99	1.419,64	2.330,83	6.206,78	2.260,05	889,90	864,36		2.762,08	3.730,81	1.584,56	734,26	1.413,18	1.358,42	1.138,96	211,77						41.429,33	
436	Kota Ambon	7.490,69	3.959,58	1.987,46	2.232,13		4.051,67		1.241,55	1.487,15		2.902,15		1.454,55	908,59	1.215,37		288,66							29.219,55	
437	Kab. Seram Bagian Barat	12.432,27	2.937,92	2.561,13	1.538,69	2.312,98	4.394,30	1.286,07	817,30	873,84		3.035,45		1.019,11	760,16	1.285,95	1.337,84	1.104,65	206,81						37.905,47	
438	Kab. Seram Bagian Timur	13.867,15	2.375,81	2.614,86	1.743,01		3.485,80	1.028,81	746,64	716,29	3.642,34	2.083,84	4.298,95	1.951,85		1.304,66	1.733,12	1.056,32	193,09						42.842,54	
439	Kab. Kepulauan Aru	16.735,11	2.574,70	3.122,43	1.361,13	2.317,36	4.600,85		867,73	734,23		5.923,65		1.218,47	764,70	1.380,16	2.741,57	1.126,08	197,99		908,42				46.574,58	
440	Kota Tual	7.611,87	1.222,43	1.946,80	1.206,24		3.174,15	799,97	616,75	810,38		5.457,16	2.507,73	719,34	660,88			221,27							26.954,97	
441	Kab. Maluku Barat Daya	11.186,03	3.544,42	1.949,39	1.776,39		7.566,05	648,44	831,97	610,22	1.656,69	2.605,30	2.934,34		617,65	1.433,49	1.494,94	1.061,77	197,91						40.115,00	
442	Kab. Buru Selatan	11.963,05	2.434,36	2.779,74	1.562,32		3.364,78	914,12	622,38	540,50		1.911,87	4.075,78	1.725,27		1.597,21	1.031,10	181,39							34.703,87	
XXX	Provinsi Maluku Utara						12.890,09	19.959,81				5.008,12														37.858,02
443	Kab. Halmahera Tengah	7.555,26	1.872,42	2.247,02	947,01		8.127,52	1.476,90	716,66	937,55		6.347,25	6.950,60	1.163,49	700,26	1.431,80	1.783,88	1.314,56	215,80						43.787,98	
444	Kab. Halmahera Barat	14.560,04	4.449,47	2.837,04	1.729,98		6.918,54	1.492,81	984,39	911,89		2.590,83	6.776,67	1.236,06	821,81	1.488,30	1.561,94	1.249,59	227,11						49.836,49	
445	Kota Ternate	11.186,09	2.193,59	2.060,40	1.694,86		9.020,90		951,19	1.233,99	3.236,45	3.072,79	3.365,58	2.020,71	914,52	1.279,74		724,01	410,98						43.365,80	
446	Kab. Halmahera Timur	10.467,97	1.601,24	2.491,27	892,37	2.267,72	6.022,24	1.164,12	646,10	763,38	2.615,14	1.349,27	3.334,25	1.179,91		1.283,25	1.650,86	2.463,70	195,57						40.408,36	
447	Kota Tidore Kepulauan	11.709,04	2.470,64	2.134,22	1.126,06		7.944,34	1.430,56	898,84	1.049,87	4.104,57	3.805,32	3.450,37	1.229,59	731,69	1.178,19		221,87							43.485,17	
448	Kab. Kepulauan Sula	10.486,07	3.269,00	1.848,61	1.737,68		7.062,01	1.594,06	900,37	889,56		4.387,86		1.166,63	841,95	1.099,60	1.762,91	1.128,08	214,92						38.389,31	
449	Kab. Halmahera Selatan	13.298,07	5.716,87	3.713,55	1.016,05	2.384,93	6.858,12	1.046,44	797,15	808,38		6.374,14	3.222,76	1.199,29	920,32	1.162,40	2.989,76		201,30	903,40					52.612,94	
450	Kab. Halmahera Utara	11.097,55	2.227,85	3.653,50	1.486,25	2.834,11	8.109,09	1.353,75	912,73	819,10		3.986,86	3.290,23	1.183,59	838,23	1.227,66	1.596,91	1.375,14	203,40					4.499,04	50.694,99	
451	Kab. Pulau Morotai	22.822,45	2.805,60	3.047,46	2.091,16	2.577,47	6.137,45	1.427,08	830,05	686,19	7.245,92	5.987,01	3.326,70	1.561,11	743,46	1.400,66	1.837,23	1.100,04	217,46	1.075,90					66.920,40	
XXX	Provinsi Papua						16.124,86	64.474,93	17.029,14			8.562,24														106.191,17
452	Kab. Biak Numfor	20.476,83	7.828,25	2.820,39	1.892,10	2.719,14	11.173,23		952,00	1.071,34	2.245,04	7.523,69		1.057,88	1.110,50	1.765,05	2.079,73	1.322,49	262,50					5.272,15	71.582,31	
453	Kab. Jayapura	18.787,78	4.853,46	2.099,15	1.313,97	2.587,65	9.147,47	1.483,79	791,14	1.391,76		2.925,01	6.513,47	1.337,80	879,14	1.534,48		196,53							55.842,60	
454	Kab. Jayawijaya	13.550,51	4.491,98	3.634,12	4.473,55		7.693,67	2.948,09	1.686,65	1.093,41		1.872,92	4.805,60	1.073,58	1.023,07	2.315,44	3.514,82	1.780,58	236,04						56.194,03	
455	Kab. Merauke	30.190,67	5.952,17	5.452,85	2.058,60		22.083,75	3.962,84	1.365,98	1.262,09		5.557,92		908,04	1.168,80	1.622,42	4.119,04	2.706,60	207,49						102.708,75	
456	Kab. Mimika	8.893,74	4.363,40	2.094,40	1.768,91		15.326,31	1.229,21	1.082,69	1.152,48		3.348,56		1.150,46	915,31	2.371,18	3.300,79	1.221,49	204,97						49.423,90	
457	Kab. Nabire	17.773,55	4.971,59	4.022,45	1.858,09	2.597,40	11.776,41	1.299,60	1.202,15	1.339,51	2.867,32	6.606,75	3.482,57		830,26	904,08	1.227,36	2.332,05	2.679,57	213,00					67.983,71	
458	Kab. Paniai	28.518,75	6.369,77	3.172,54	3.703,34		20.318,79		1.331,66	1.086,38	3.169,99	3.055,86		1.566,11	842,39	2.183,66	3.723,58	3.113,14	271,27	7.515,67					89.942,90	
459	Kab. Puncak Jaya	14.582,92	2.989,92	7.140,91	3.507,26	3.798,23	19.204,28		1.489,36	945,41		2.296,14	4.755,59	1.626,34	1.256,88	2.241,03	5.156,15	2.273,75	287,84	10.814,61					84.366,62	
460	Kab. Kepulauan Yapen	13.610,81	3.175,65	2.303,85	1.378,60		6.595,80	1.052,98	834,86	896,18		3.217,14	3.447,10	1.396,37	866,57	1.542,32	2.866,10	1.381,57	233,61						44.799,51	
461	Kota Jayapura	8.813,55	2.776,99	3.110,95	1.751,93		8.860,34	993,02	2.582,87	1.771,39		5.224,87	3.169,12	1.535,79	906,24	1.222,63		1.306,71	236,84						44.263,24	
462	Kab. Sarmi	8.718,60	4.620,93	2.010,47	1.670,48		6.942,68	1.041,49	793,80	1.080,95		1.391,53		1.249,75	756,97	1.466,06	2.471,85	1.414,05	203,32	1.488,29					37.321,22	
463	Kab. Keerom	15.612,25	2.687,11	5.038,39	1.352,21	2.666,03	7.400,04	1.178,10	1.057,44	1.041,04		1.396,73		1.247,07	756,49	1.501,38	3.097,69	3.401,73	211,80						57.232,20	
464	Kab. Yahukimo	32.030,36	3.465,22	13.692,47	2.409,69		8.986,03		1.124,66	812,47		3.742,31	3.012,67	1.241,23	1.355,47	1.503,15	3.285,98	1.635,04	206,19	6.810,00					85.313,14	
465	Kab. Pegunungan Bintang	15.641,58	4.650,45	3.508,72	2.708,77		15.372,36		1.250,53	898,27		2.261,05	10.620,06	1.375,08	1.237,20	2.283,98	4.554,74	1.820,79	246,11	9.866,67			13.230,78		91.527,14	
466	Kab. Tolikara	19.348,01	5.689,57	12.448,31	2.353,86		7.369,14		1.292,11	868,44		2.070,02	12.534,31	1.499,74	1.481,14	1.778,86	4.076,05	1.691,00	229,44	8.768,27					83.498,27	
467	Kab. Boven Digoel	10.962,81	4.025,99	3.276,29	1.451,76		10.524,92		873,47	966,81		1.431,12		1.304,81	855,96	1.373,22	3.686,42	1.642,51	208,54	1.797,73					52.299,32	
468	Kab. Mappi	14.885,51	3.100,88	3.513,51	2.024,85	4.356,91	16.636,49		958,38	812,30	6.499,69	2.340,74	3.624,47	1.389,55	867,50	5.539,44	1.699,08	217,20	4.720,83					</		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	DAERAH	PENDIDIKAN		KESEHATAN										KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	LISTRIK PERDESAAN	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SARPRAS KAWASAN PERBATASAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	TOTAL				
		PENDIDIKAN SD	PENDIDIKAN SMP	PELAYANAN DASAR	FARMASI	PELAYANAN RUJUKAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	KELAUTAN & PERIKANAN	PERTANIAN							LINGKUNGAN HIDUP	KELUARGA BERENCANA	KEHUTANAN	SARPRAS DAERAH TERTINGGAL
470	Kab. Wajo	12.788,86	2.075,55	1.923,12	2.072,30	10.078,22	1.035,98	720,96	974,53	1.891,75	1.891,75	3.522,80	1.341,37	789,22	1.744,49	2.038,82	202,93	2.941,91	39	15	42	39.703,10	
471	Kab. Soppori	8.328,76	2.577,34	2.278,48	1.121,71	5.087,04	8.215,57	775,71	854,20	1.767,92	1.767,92	3.522,80	987,67	673,30	1.200,14	4.736,18	1.401,34	229,04	39	15	42	38.680,52	
472	Kab. Mambarano Raya	5.947,19	3.018,28	1.887,33	1.668,49	10.049,09	1.397,84	994,33	947,12	1.330,02	1.330,02	8.928,70	922,60	736,03	1.572,08	3.970,38	1.971,74	257,23	39	15	42	48.333,28	
473	Kab. Mambarano Tengah	9.091,89	2.371,43	2.330,90	2.609,48	5.709,71	947,10	956,19	741,50	1.314,17	1.314,17	8.928,70	910,88	697,79	2.252,08	3.881,83	1.789,12	222,40	39	15	42	61.903,02	
474	Kab. Lanny Jaya	13.964,46	2.805,12	6.309,61	2.758,15	12.330,16	3.687,04	1.481,10	1.068,00	1.773,83	1.773,83	6.143,17	1.088,74	828,31	2.230,14	3.749,53	1.489,09	228,16	39	15	42	85.821,05	
475	Kab. Lanny Jaya	31.092,95	2.683,43	1.925,31	6.206,35	4.016,90	6.681,23	8.401,83	1.603,90	1.829,79	1.829,79	1.629,35	1.096,60	887,81	1.726,56	5.081,99	1.927,05	248,56	39	15	42	58.441,42	
476	Kab. Nabua	10.153,97	3.117,14	2.110,44	5.388,76	27.973,16	1.593,90	1.286,11	883,64	1.693,35	1.693,35	1.286,06	1.286,06	720,91	1.520,99	2.882,91	1.381,70	237,71	39	15	42	84.101,27	
477	Kab. Puncak	22.059,80	2.497,84	4.289,48	2.761,30	11.377,75	1.153,39	889,01	679,57	1.286,06	1.286,06	10.727,88	1.297,12	720,91	1.520,99	2.882,91	1.381,70	237,71	39	15	42	54.101,27	
478	Kab. Dogiyai	9.868,08	2.497,84	4.289,48	2.761,30	11.377,75	1.153,39	889,01	679,57	1.286,06	1.286,06	10.727,88	1.297,12	720,91	1.520,99	2.882,91	1.381,70	237,71	39	15	42	88.776,57	
479	Kab. Irian Jaya	25.610,12	5.107,40	2.475,05	5.534,55	9.326,07	1.349,87	1.349,87	1.318,19	2.883,91	2.883,91	10.727,88	1.147,55	1.147,55	2.121,65	5.679,82	4.303,31	269,47	39	15	42	88.776,57	
480	Kab. Dogiyai	26.264,42	7.566,78	5.748,34	5.388,49	16.625,24	10.354,72	1.609,07	1.347,42	7.285,95	7.285,95	1.147,55	1.147,55	1.147,55	2.121,65	5.679,82	4.303,31	269,47	39	15	42	88.776,57	
KCCXII	Provinsi Papua Barat	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	10.354,72	20.992,44	38.633,11
481	Kab. Soreng	21.402,66	3.038,32	3.208,84	1.292,98	4.768,49	20.166,53	3.387,67	1.234,99	1.232,98	1.232,98	7.574,39	1.263,00	908,37	1.671,64	2.348,95	1.167,85	214,38	39	15	42	79.210,21	
482	Kab. Madoera	11.654,72	4.495,31	4.104,66	1.802,70	3.447,18	8.003,23	1.179,82	1.096,53	1.096,53	1.096,53	8.003,97	1.667,64	1.367,75	1.590,02	1.440,92	931,94	202,69	39	15	42	54.313,97	
483	Kab. Padoak	14.144,75	2.492,02	3.276,93	3.410,46	7.995,10	872,07	746,73	812,30	1.377,51	1.377,51	1.462,34	791,20	1.440,92	1.440,92	1.440,92	931,94	220,24	39	15	42	40.743,40	
484	Kota Sorong	7.789,48	2.125,19	3.430,90	1.202,73	3.163,85	3.310,56	1.147,10	1.176,59	3.399,07	2.724,64	2.253,13	1.683,19	733,97	1.304,38	1.789,12	931,94	220,24	39	15	42	34.991,88	
485	Kab. Sorong Selatan	14.860,71	2.392,16	5.087,86	1.418,46	2.584,16	8.860,34	950,59	818,89	7.370,76	2.253,13	3.671,92	1.903,36	733,97	1.391,60	2.650,72	1.392,15	218,32	39	15	42	66.007,67	
486	Kab. Raja Ampat	10.156,64	3.286,36	4.384,21	1.834,78	9.622,76	2.581,75	874,92	1.033,68	4.869,20	2.163,15	3.317,34	1.202,71	847,35	1.288,58	2.530,36	1.339,81	190,20	39	15	42	54.306,59	
487	Kab. Teluk Bintuni	6.645,47	4.700,38	3.532,83	1.110,46	2.437,94	9.023,63	743,06	882,13	2.163,15	3.317,34	1.202,71	847,35	1.288,58	2.530,36	1.339,81	1.339,81	190,20	39	15	42	43.298,34	
488	Kab. Teluk Wondama	9.074,21	2.659,82	2.587,50	1.238,93	2.698,38	6.518,76	850,65	1.331,30	3.239,46	2.848,92	3.587,19	1.243,13	745,70	1.699,24	2.454,58	1.335,13	208,76	39	15	42	45.918,69	
489	Kab. Kimana	8.453,22	3.453,12	2.650,36	1.002,59	4.498,75	792,26	723,00	841,43	4.285,07	3.985,68	1.279,19	708,84	708,84	4.807,73	4.807,73	1.170,90	189,09	39	15	42	37.262,93	
490	Kab. Maybrat	6.844,35	3.081,82	2.387,29	2.286,09	4.447,33	1.009,02	792,26	687,68	1.815,71	1.815,71	3.054,36	1.012,53	723,58	1.675,46	1.749,59	1.188,09	199,74	39	15	42	38.200,06	
491	Kab. Tambora	11.151,15	3.255,83	2.582,39	2.892,41	9.332,29	1.650,17	909,86	741,97	6.989,49	3.880,48	1.236,66	783,89	783,89	1.779,88	4.148,88	1.417,25	235,27	39	15	42	70.044,22	
Jumlah Kab/Kota	441	441	443	444	444	448	399	445	449	445	445	381	442	437	382	183	235	445	39	15	42	488	
Jumlah Total	6.033.040,00	2.200.220,00	1.155.990,00	1.100.655,00	631.836,00	3.410.844,85	943.935,60	502.094,00	463.851,00	444.504,00	1.350.519,00	1.879.588,00	479.720,00	392.257,00	469.753,00	356.940,00	346.132,00	131.617,00	190.640,00	191.243,00	121.385,00	171.385,00	24.784.561,45
Jumlah Provinsi					18	32	29				32				20							32	
Jumlah Total					117.420,0	601.914,2	404.534,4					187.500,0			20.000,0							1.331.356,6	
Total Daerah	441	441	443	444	444	480	418	445	449	445	445	381	442	437	382	183	235	445	39	15	42	520	
Jumlah Total Nasional	6.033.040,00	2.200.220,00	1.155.990,00	1.100.655,00	749.256,0	4.012.761,0	1.348.208,0	502.094,0	463.851,0	444.504,0	1.547.119,0	1.879.588,0	479.720,0	392.257,0	489.783,0	356.940,0	345.132,0	131.617,0	190.640,0	191.243,0	121.385,0	171.385,0	26.119.948,0

(dalam juta rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO KEUANGAN

u.b

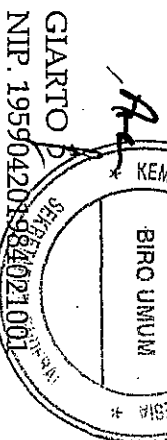
KEPALA BAKOSAN T.U. KEMENTERIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

tttd,

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



GIARTO

NIP. 195904201984021001